



BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU
BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN

Laporan Kinerja BRMP Riau 2025



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU



**BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, Laporan Capaian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP RIAU) Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Capaian Kinerja BPMP RIAU merupakan bentuk pertanggungjawaban BPMP RIAU terhadap akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, pencapaian sasaran strategis seperti tertuang di dalam Perjanjian Kinerja sekaligus wujud transparansi kepada masyarakat dalam penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tupoksi dan penggunaan sumberdaya.

Keberhasilan capaian kinerja BPMP RIAU selama Tahun 2025 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran BPMP RIAU, dukungan instansi pusat dan daerah serta semua pihak dalam memajukan pertanian di Provinsi Riau dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi serta berkontribusi dalam penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih. Harapan kami, semoga Laporan Capaian Kinerja ini dapat bermanfaat khususnya bagi BPMP RIAU sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPMP RIAU ke depan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2026

Kepala Balai



Dr. Agus Wahayana Anggara, S.Si., M.Si.
NIP. 19740402 199903 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja mengacu pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode, atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi adalah upaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam *intervensi* publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPMP RIAU mengawalinya dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia melalui suatu proses untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan.

Pada tahun anggaran 2025, realisasi anggaran BPMP RIAU adalah sebesar Rp. 8.378.704.272 atau 98,93% dari pagu Rp. 8.469.398.000,- dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,74. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 44.987.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 108.520.950,- atau 241.23%.

Capaian Kinerja BPMP Riau pada indikator kinerja jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga) sebesar 100%, jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (unit) sebesar 106.78%, nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai) sebesar 100.62% dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai) sebesar 107.41%.

Dari evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa kinerja BPMP RIAU berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Renstra tahun 2025 menunjukkan keberhasilan mencapai sasaran dari target pada tahun tersebut dengan nilai

103.70% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Koordinasi dan perencanaan kegiatan yang baik sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya meningkatkan nilai indikator capaian kinerja BPMP RIAU.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas, Fungsi dan Organisasi BPMP RIAU.....	3
1.2 Kondisi Demografi BPMP RIAU	4
1.3 Sumber Daya Serta Keunggulan Lainnya	6
1.4 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan.....	8
2.4. Sasaran	9
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja	16
3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
3.1.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
3.1.3. Kinerja Hasil Kegiatan BPMP RIAU TA 2025	25
3.1.4. Capaian Lainnya BPMP RIAU TA 2025	49
3.1.5. Kinerja Pelayanan Publik BPMP RIAU TA 2025	51
3.1.6. Kendala dan Langkah Antisipasi.....	65
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	66
3.2.1. Realisasi Keuangan.....	67
3.2.2. Pengelolaan PNBPN	67
IV. PENUTUP	69
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	69
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	4
Gambar 3. 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP RIAU per 31 Desember 2025	24
Gambar 3. 1 NK Perencanaan Anggaran BPMP Riau Tahun 2025.....	25
Gambar 3. 3 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Riau.....	27
Gambar 3. 4 Pengolahan Tanah dan Pengawasan oleh Petugas UPT PSBTPH Provinsi Riau	28
Gambar 3. 5 Penaburan Benih di Tempat Persemaian Lokasi Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya.....	29
Gambar 3. 6 Penanaman Benih Padi	29
Gambar 3. 7 Pemupukan Padi Sawah	30
Gambar 3. 8 Pengendalian OPT.....	30
Gambar 3. 9 <i>Roguing</i> Fase Masak	31
Gambar 3. 10 Panen Padi	31
Gambar 3. 11 Prosesing Benih Padi.....	32
Gambar 3. 12 Benih Padi Kelas SS yang Telah Tersertifikasi	33
Gambar 3. 13 Tim BPMP Riau mendampingi SID di Kabupaten Indragiri Hilir.....	34
Gambar 3. 14 Percepatan Tanam Oplah dan Pendampingan Teknologi	34
Gambar 3. 15 Pengendalian Hama Tikus di Lokasi Oplah Indragiri Hulu	35
Gambar 3. 16 Gerakan Percepatan Tanam di Kabupaten Indragiri Hilir	37
Gambar 3. 17 Gerakan Percepatan Tanam di Kabupaten Kampar	38
Gambar 3. 18 Gerakan Percepatan Tanam Padi di Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar	39
Gambar 3. 19 Gerakan Percepatan Tanam Padi Gogo di Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru.....	39
Gambar 3. 20 Sosialisasi dan Pembentukan Brigade Pangan di Kab. Kepulauan Meranti	41
Gambar 3. 21 Pendampingan Brigade Pangan di Kabupaten Indragiri Hulu	41
Gambar 3. 22 Pendampingan Pertanaman Jagung di lahan SPN oleh BPMP RIAU	42
Gambar 3. 23 Polri, Gubernur Riau dan BPMP RIAU Tanam Jagung Serentak Dukung Swasembada Pangan	43
Gambar 3. 24 Panduan Inovasi Percepatan Tanam BPMP RIAU.....	44
Gambar 3. 25 Padi Kolam dan Padi dalam Pot di Halaman BPMP RIAU	44
Gambar 3. 26 Padi Apung di Halaman BPMP RIAU	45
Gambar 3. 27 Demplot Padi Kolam di Halaman Rumah Dinas Gubernur Riau.....	45
Gambar 3. 28 Rakor Kegiatan Perbenihan BPMP RIAU.....	46
Gambar 3. 29 <i>Display</i> Penerapan Standar Instrumen Pembibitan Ayam KUB-2	48
Gambar 3. 30 <i>Display</i> Pemeliharaan Budidaya kambing Boerka.....	49
Gambar 3. 31 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	50

Gambar 3. 32 Pendampingan BPMP RIAU ke My Limer Coffee pada tanggal 24 Oktober 2025	50
Gambar 3. 33 Rapat Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian BPMP RIAU.....	53
Gambar 3. 34 Bimbingan Teknis Validasi Metode	53
Gambar 3. 35 Seminar Nitrogen Analyzer N-Relyzer Gerhard Metode Dumas.....	55
Gambar 3. 36 Diseminasi Pertanian Modern	58
Gambar 3. 37 Kegiatan BPMP RIAU di Media Online dan Riau TV “Tani Keren”	59
Gambar 3. 38 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	61
Gambar 3. 39 Kunjungan Perpustakaan BPMP RIAU.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tenaga ASN Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2025.....	4
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Pegawai BPMP RIAU menurut Golongan Ruang dan Gaji Tahun 2025.....	5
Tabel 1. 3 Fungsional BPMP RIAU Tahun 2025	5
Tabel 1. 4 Tenaga ASN Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Tahun 2025.....	5
Tabel 2. 1 Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, Judul Kegiatan dan Alokasi Anggaran TA 2025	11
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BPMP RIAU Tahun 2025 (Awal)	13
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja BPMP RIAU Tahun 2025 Kedua	14
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja BPMP RIAU Tahun 2025 Ketiga	15
Tabel 3. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP RIAU TA 2025.	16
Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja BPMP RIAU Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025	18
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja BPMP Riau Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023-2025	19
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja BPMP Riau Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	20
Tabel 3. 5 Lembaga Penerap Standar yang Didampingi oleh BPMP RIAU.....	22
Tabel 3. 6 Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS.....	32
Tabel 3. 7 Perkembangan Oplah sampai 29 Desember 2025.....	35
Tabel 3. 8 Realisasi LTT Provinsi Riau per 29 Desember 2025	36
Tabel 3. 9 Realisasi LTT Padi Gogo Provinsi Riau per Desember 2025.....	39
Tabel 3. 10 Jumlah Brigade Pangan di Provinsi Riau Tahun 2025	40
Tabel 3. 11 Layanan Informasi Teknologi Terstandar dan Hasil <i>Display</i> Pembibitan Ayam KUB-2	48
Tabel 3. 12 Permohonan Pengujian Laboratorium Tanah Bulan Januari s.d. Bulan Desember Tahun 2025	51
Tabel 3. 13 Rekap Diseminasi Video Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Modernisasi Pertanian	56
Tabel 3. 14 Updating Berita Website dan Media Sosial.....	59
Tabel 3. 15 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian BPMP RIAU melalui Website dan Media Sosial Bulan Januari – Desember 2025.....	60
Tabel 3. 16 Nilai IKM BPMP RIAU Tahun 2025	62
Tabel 3. 17 Jumlah Mahasiswa/Siswa Magang di BPMP RIAU pada tahun 2025	63
Tabel 3. 18 Revisi Anggaran BPMP Riau TA 2025	66
Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Keuangan TA 2025.....	67
Tabel 3. 20 Target dan Realisasi PNPB BPMP RIAU Tahun 2025	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Riau (pertama)	71
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Riau (Revisi II)	77
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPMP RIAU (Revisi III)	83
Lampiran 4. SK Kepala BRMP Penetapan Nilai ZI 2025	86
Lampiran 5. Manual IKU BPMP Riau.....	93
Lampiran 6. SK Kepala BPMP Riau tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lakin) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2025	106
Lampiran 7. Rincian dan Diseminasi Penjualan UPBS BPMP Riau Tahun 2025	109
Lampiran 8. Pernyataan Mandiri SNI Bina UMK Pelaku Usaha Nata de Coco "Salju"	120
Lampiran 9. Surat Keputusan Sertifikasi Produk SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk, Nomor 56/7701/SRTF/I/2025 untuk Rumah Produksi My Limer Coffee.	121
Lampiran 10. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI	124
Lampiran 11. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Balai	124

I. PENDAHULUAN

Pertanian memiliki kontribusi besar dan turut berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi berpengaruh nyata pada produk domestik bruto (PDB) nasional. Peran strategis pertanian yaitu sebagai penyedia lapangan kerja juga penyedia bahan baku dan pasar potensial bagi sektor industri. Dalam menghadapi dinamika global, perubahan iklim, serta meningkatnya persaingan perdagangan nasional dan internasional, pembangunan pertanian dituntut untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, bermutu, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan, diperlukan penerapan teknologi serta modernisasi pertanian yang tepat guna dan sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. Keterbatasan sumber daya lahan, efisiensi, serta kebutuhan peningkatan mutu dan nilai tambah produk pertanian membuat pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga produktivitas dan efisiensi usaha tani. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam mendukung penerapan inovasi dan modernisasi pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPMP memiliki fungsi yaitu (1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, (2) Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern, (3) Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian, (4) Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian, (5) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia, (6) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, (7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan

hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, serta (8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP ini membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan petani sebagai subyek pembangunan daerah. Dimana semua komponen tersebut mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian, baik dalam menanggapi isu-isu aktual di bidang pertanian khususnya dalam hal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BPMP RIAU melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemerintah unsur penyelenggara pemerintahan negara akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja.

Laporan Capaian Kinerja BPMP RIAU merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan bagi lembaga, dan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna menentukan arah penerapan modernisasi pertanian sesuai dengan tujuan dan sasaran balai. Laporan Capaian Kinerja BPMP RIAU disusun mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010 berubah menjadi penyusunan LAKIN berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014.

Fungsi Laporan ini antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP RIAU menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyusunan laporan mengacu pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan

dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi adalah upaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam *intervensi* publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Evaluasi untuk penilaian Capaian Kinerja meliputi 5 komponen yaitu 1). Perencanaan kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja; 2). Pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; 3). Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja; 4). Evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi; dan 5). Pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output dan outcome*), dan kinerja lainnya.

1.1 Tugas, Fungsi dan Organisasi BPMP RIAU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) yang mempunyai tugas penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. BPMP memiliki fungsi antara lain (1) pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, (2) pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern, (3) pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian, (4) pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian, (5) pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia, (6) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, (7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, (8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Struktur organisasi BPMP RIAU berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi & Penerapan Modernisasi Pertanian
- d. Ketua Tim Layanan Kerjasama & Diseminasi Modernisasi Pertanian
- e. Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh
- f. Koordinator Jabatan Fungsional Lainnya



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

1.2 Kondisi Demografi BPMP RIAU

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan 31 Desember 2025, BPMP RIAU memiliki sumber daya manusia sebanyak 69 orang ASN yang terdiri dari 2 pejabat struktural, 38 pejabat fungsional tertentu dan 16 pejabat fungsional umum serta dibantu oleh 11 orang PPPK 2 orang tenaga PPNPN. Sebaran jumlah tenaga BPMP RIAU menurut pangkat, golongan, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional disajikan pada Tabel berikut

Tabel 1. 1 Tenaga ASN Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2025

No	Gol/Ruang	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
----	-----------	----	----	----	----	----	----	----	------	------	----	--------

1.	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
3.	III	1	13	14	0	0	0	0	3	0	0	31
4.	IV	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5.	V (PPPK)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
6.	IX (PPPK)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Jumlah		3	17	18	0	0	0	0	18	0	0	56

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Pegawai BPMP RIAU menurut Golongan Ruang dan Gaji Tahun 2025

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1.	I	0	0	0	0	0	0
2.	II	0	0	1	2	0	3
3.	III	13	10	8	9	0	40
4.	IV	3	2	0	0	0	5
5.	V (PPPK)	-	-	-	-	-	4
6.	IX (PPPK)	-	-	-	-	-	4
Jumlah							56

Tabel 1. 3 Fungsional BPMP RIAU Tahun 2025

No	Fungsional	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	Madya	1
		Muda	1
		Pertama	4
		Muda	2
2.	Pengawas Benih Tanaman	Pertama	3
		Penyelia	1
		Mahir	3
		Terampil	2
3.	POPT	Pertama	1
4.	Penyuluh	Madya	3
		Muda	4
		Pertama	4
5.	Analisis Standardisasi	Muda	1
		Pertama	2
6.	Pranata Komputer	Pertama	2
7.	Perencana	Pertama	1
8.	Analisis Pengelola APBN	Pertama	1
9.	Pranata Humas	Pertama	1
10.	Arsiparis	Pertama	1
Jumlah			38

Tabel 1. 4 Tenaga ASN Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan Fungsional	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SLTA	
1.	PMHP Madya	-	1	-	-	-	1
2.	PMHP Muda	-	1	-	-	-	1
3.	PMHP Pertama	-	-	4	-	-	4
4.	PBT Muda	-	2	-	-	-	2
5.	PBT Pertama	-	1	2	-	-	3
6.	PBT Penyelia	-	-	-	-	1	1
7.	PBT Mahir	-	-	-	-	3	3
8.	PBT Terampil	-	-	-	-	2	2
9.	POPT Pertama	-	-	1	-	-	1
10.	Penyuluh Madya	-	3	-	-	-	3
11.	Penyuluh Muda	-	4	-	-	-	4
12.	Penyuluh Pertama	-	1	3	-	-	4
13.	Analisis Standardisasi	1	-	2	-	-	3
14.	Pranata Komputer	-	1	1	-	-	2
15.	Perencana	-	-	1	-	-	1
16.	Analisis Pengelola APBN	-	-	1	-	-	1
17.	Pranata Humas	-	-	1	-	-	1
18.	Arsiparis	-	-	1	-	-	1
Jumlah		1	14	17	0	6	38

1.3 Sumber Daya Serta Keunggulan Lainnya

Unit Pengelola Benih Sumber BPMP RIAU mengelola SDG dan memproduksi benih sumber beberapa varietas yang diperlukan sesuai agroekosistem di Riau, meliputi padi sawah, padi rawa pasang surut, rawa lebak, padi gogo/lahan kering, sawah tadah hujan, dan lahan padi di bawah naungan pohon (sawit dan kelapa dalam). Disamping itu, juga memproduksi benih tanaman hortikultura dan perkebunan, serta perbibitan ternak spesifik lokasi sesuai mandat Kementan.

Keberadaan Kebun Percobaan (KP) yang saat ini disebut Instalasi Penerapan dan Pengujian Modernisasi Pertanian (IP2MP) dioptimalkan sebagai media *display* penerapan pertanian modern yang terstandar sebagai media edukasi pertanian interaktif dalam bentuk Taman Agromodern. IP2MP dimanfaatkan sebagai *show window* percontohan penerapan GAP dengan pendekatan efektif (fungsinya), efisien (penggunaan sumberdaya), dan produktif (bernilai ekonomi) yang bisa dilihat langsung, sehingga bisa direplikasi oleh masyarakat. Lahan dapat dikelola secara swakelola maupun bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan aturan

perundangan untuk kegiatan produksi, perbenihan, diseminasi, dan beragam layanan pengujian proses/metode maupun produk.

BPMP RIAU melaksanakan pendampingan penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas terstandar sehingga meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kabupaten Indragiri Hilir dengan komoditas beras serta dilaksanakan di Kepulauan Meranti dengan produk kopi sangrai dan kopi bubuk.

Keberadaan laboratorium di BPMP Riau meliputi laboratorium tanah dan pupuk, laboratorium benih, dan laboratorium pascapanen direvitalisasi sesuai kebutuhan institusi menuju layanan prima. Ke depan, agar layanan yang diberikan dijamin akurat, presisi, dan diakui hasilnya, maka akreditasi laboratorium mutlak diperlukan, minimal akreditasi KAN/ISO. Untuk itu, peralatan yang digunakan harus sudah terkalibrasi, prosedur kerja dibakukan, serta personel pelaksana telah bersertifikat. Secara bertahap, akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM laboratorium dan sertifikasi KAN.

Sapras perbenihan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan secara bertahap dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi guna menghasilkan benih-benih terstandar. Demikian juga dengan fasilitas perbibitan untuk ayam KUB dan Kambing Boerka. Modernisasi perlu dilakukan agar laboratorium benih mampu melakukan kegiatan kultur jaringan untuk menghasilkan benih tanaman secara lebih cepat dan masal. Hal tersebut diperlukan agar laboratorium benih dan fasilitas perbenihan BPMP Riau lebih optimal menghasilkan PNBP.

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Fasilitas berupa laboratorium benih, laboratorium tanah dan pupuk, laboratorium pascapanen, fasilitas perbenihan, kebun percobaan, lantai jemur, gudang penyimpanan benih, UPBS, serta fasilitas pendukung lainnya belum dimanfaatkan secara optimal dan ketersediaan peralatan, alsintan untuk mendukung kegiatan perbenihan dan tusi lainnya belum tersedia lengkap di IP2MP BPMP RIAU (baik IP2MP Siak Hulu maupun IP2MP Sei Mandau) akibat dari keterbatasan anggaran.

II. PERENCANAAN KINERJA

BPMP RIAU merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), yang secara hierarki merupakan unit fungsional BRMP. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, BRMP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BRMP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BRMP dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BRMP 2025 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BRMP, termasuk BBPPMP dan BPMP RIAU.

2.1. Visi

Visi BPMP RIAU mengacu kepada visi BBPPMP, visi BRMP dan visi Kementerian Pertanian, maka visi BPMP RIAU ke depan, yaitu **"Menjadi lembaga terkemuka di Provinsi Riau dalam penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi, mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong"**.

2.2. Misi

Misi BPMP RIAU selaras dengan misi BBPPMP dan misi BRMP serta mendukung misi Kementerian Pertanian dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- Menerapkan pertanian modern spesifik lokasi untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- Menerapkan pertanian modern spesifik lokasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
- Melaksanakan dan mendiseminasikan pertanian modern serta peningkatan kapasitas SDM pertanian

2.3. Tujuan

Tujuan BPMP RIAU tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian, dengan indikator tujuan jumlah usaha tani yang mendapatkan pendampingan penerapan

standar pertanian

2. Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif, dengan indikator tujuan Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator tujuan Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator tujuan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

2.4.Sasaran

Sasaran BPMP RIAU mendukung sasaran program BBPPMP dan BRMP. Adapun sasaran kegiatan BPMP RIAU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian
2. Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif
3. Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, program/kegiatan BPMP RIAU selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian

Untuk mencapai Indikator Kinerja I, BPMP RIAU memiliki kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau

Sasaran 2: Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasa dan Perakitan yang Adaptif

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS dengan target yang dihasilkan sebanyak 70 ton.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Pada tahun anggaran 2025, BPMP RIAU memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau sebesar 85.

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai) adalah 91.

Selain empat sasaran di atas BPMP RIAU pada tahun 2025 juga melakukan kegiatan layanan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. Koordinasi; yang terdiri dari Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian.
2. Layanan dukungan manajemen internal; yang terdiri dari (a) pengelolaan BMN, IP2SIP dan sarana penunjang lainnya, (b) pengelolaan informasi publik, (c) penyusunan program dan anggaran, (d) layanan penerapan sip dan pengelolaan produk hasil, (e) layanan kepegawaian, (f) layanan keuangan, (g) layanan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perlengkapan, (h) sinkronisasi kegiatan, (i) pembayaran gaji dan tunjangan, (j) kebutuhan sehari-hari perkantoran, (k) langganan daya dan jasa serta (l) pemeliharaan kantor.
3. Layanan manajemen kinerja internal; yang terdiri dari (a) monitoring, evaluasi dan unit pengelola gratifikasi serta (b) sistem pengendalian intern dan manajemen risiko index.

Selanjutnya program-program tersebut telah dicapai melalui beberapa kegiatan yang tertuang dalam RKKS BPMP RIAU Tahun Anggaran 2025. Adapun masing-masing judul kegiatan dan alokasi anggarannya untuk Rencana Kinerja tahun 2025 , dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, Judul Kegiatan dan Alokasi Anggaran TA 2025

No	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Judul Kegiatan	Anggaran (000)	Target Output
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri • Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian – Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau	29.785	1 lembaga
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Terstandar • Perakitan dan Modernisasi Pertanian – Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS (70 ton)	1.086.820	70 unit
3	Program Dukungan Manajemen • Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian – Koordinasi	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	890.000	1 kegiatan

No	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Judul Kegiatan	Anggaran (000)	Target Output
	– Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal	Pengelolaan BMN, IP2SIP dan Sarana Penunjang Lainnya	10.000	1 layanan
		Penyusunan Program dan Anggaran	23.210	
		Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	6.660	
		Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Index	3.580	
		Pengelolaan Informasi Publik	24.250	
		Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil	40.570	
		Layanan Kepegawaian	8.000	
		Layanan Keuangan	20.130	
		Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan	15.530	
		Sinkronisasi Kegiatan	53.070	
		Pembayaran gaji dan tunjangan	4.009.284	
		Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	973.827	
		Langganan Daya dan Jasa	267.660	
		Pemeliharaan Kantor	775.160	

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pada tahun 2025, BPMP RIAU memiliki Perjanjian Kinerja yang memiliki perubahan sebanyak 2 kali, perubahan yang pertama terjadi karena menyesuaikan dengan perubahan kelembagaan yaitu perubahan dari BSIP RIAU menjadi BPMP RIAU dan yang kedua karena menyesuaikan dengan capaian realisasi pada tahun 2025. Berikut Adalah Perjanjian Kinerja BPSIP/BPMP RIAU tahun 2025.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BPMP RIAU Tahun 2025 (Awal)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
		Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	80
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	85

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja BPMP RIAU Tahun 2025 Kedua

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani Yang Menerapkan Standar Pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usaha Tani)	1
2.	Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan Dan Perakitan Yang Adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	70
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	80
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	85

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja BPMP RIAU Tahun 2025 Ketiga

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani Yang Menerapkan Standar Pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usaha Tani)	1
2.	Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan Dan Perakitan Yang Adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	70
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	85
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	91

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025, BPMP RIAU telah menetapkan 4 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP RIAU TA 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1
2.	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	70
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	85.00
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	91.00

Capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPMP RIAU selama tahun 2025 tersebut mengarah kepada spirit Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yaitu "**Standard, Services, Globalization**". Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup BPMP RIAU. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan dan triwulan masing-masing kegiatan, seminar tengah tahun/evaluasi tengah tahun, uji petik monev kegiatan ke lokasi dan seminar akhir tahun. Sedangkan realisasi keuangan dipantau menggunakan Aplikasi SAKTI dan E monev Bappenas yang di update setiap bulan.

3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPMP RIAU mengawalinya dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan suatu kinerja, dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil: capaian >100%; (2) berhasil: capaian 80-100%; (3) cukup berhasil: capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil: capaian 0-59%. Pencapaian kinerja BPMP RIAU berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja BPMP RIAU Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	100%
2.	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	70	74.75	106.78%
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	85.00	85.53	100.62%
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	91.00	97.74	107.41%
			Rerata		103.70%

Sebagai perbandingan disajikan capaian kinerja BPMP RIAU berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023-2025 pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja BPMP Riau Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023-2025

Indikator Kinerja			2023	%	2024	%	2025	%
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	T	1	100%		1	100%		
	R	1			1			
Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	T	1	120%		1	100%		
	R	8			1			
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	T						1	100%
	R						1	
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	T	10.005	100.02%		23	73.96%		
	R	10.007,07			16.93			
Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	T						70	106.78%
	R						74.75	
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	T	83	108.57%		85	105.95%		
	R	90.11			90.06			
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	T						85.00	100.62 %
	R						85.53	
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	T	86	102.91%					
	R	88.50						
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	T				95,83	102.18%	91.00	107.41 %
	R				97.92		97.74	
Rerata Persentase Per Tahun				106.30%		96,42%		103.70%

Keterangan

T = Target; R = Realiasi; % = rasio target dan realisasi

Capaian kinerja BPMP RIAU juga dianalisis berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja BPMP Riau Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	T	1	1	1	2	2
		R	1				
		%	100 %				
2.	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (Teknologi)	T	-	1	1	1	1
		R	-				
3.	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	T	70	12.036	5.026	5.026	5.026
		R	74.75				
		%	106.78 %				
4.	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Orang)	T	-	300	600	900	1.200
		R	-				
5.	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	T	85	85,53	85	85	85
		R	85.53				
		%	100.62%				
6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	T	91	91.5	92	92.5	93
		R	97.74				
		%	107.41%				
Rerata Persentase			103.70 %				

Keterangan

T = Target; R = Realiasi; % = rasio target dan realisasi

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Tabel 3.4, rata-rata capaian indikator kinerja BPMP RIAU Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja dan renstra adalah sebesar 103.70 % atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian sasaran sangat didukung oleh berbagai faktor, antara lain komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana kegiatan serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Koordinasi dan perencanaan kegiatan yang baik sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya meningkatkan nilai indikator capaian kinerja BPMP RIAU secara keseluruhan.

Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 adalah 106.30% dan tahun 2024 adalah 96,42%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, pada tahun 2025 ini capaian indikator kinerjanya lebih besar, hal tersebut membuktikan bahwa BPMP RIAU terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih baik.

Indikator kinerja yang menunjang keberhasilan kinerja BPMP RIAU pada tahun 2025 ini adalah jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (unit) dengan persentase capaian sebesar 106.78% dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (nilai) dengan persentase 107.41%. Indikator kinerja jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan tercapai melalui kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS. Pada tahun 2025 dilakukan optimalisasi pendampingan budidaya padi sampai pada panen dan penanganan pascapanen yang sesuai dengan prosedur standar produksi benih sehingga indikator kinerja jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan pada tahun 2025 dapat tercapai sebesar 106.78%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dinilai dari sisi kualitas implementasi kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA), kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP) serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output). Nilai IKPA BPMP RIAU sebesar 97.74 yang termasuk kategori sangat baik. Nilai IKPA yang tinggi ini

sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja BPMP RIAU.

Hasil analisis capaian kinerja BPMP RIAU berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani
Indikator Kinerja :	Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga)

Pada Tabel 3.3 dapat dilihat target indikator kinerja pertama adalah 1 (satu) terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani dengan realisasi capaian sebanyak 1 (satu) lembaga (tercapai 100 %) yang dicapai melalui kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau. Lembaga yang telah menerapkan standar instrumen pertanian yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Lembaga Penerap Standar yang Didampingi oleh BPMP RIAU

No.	Nama Lembaga/ Pelaku Usaha Tani	SNI yang Diterapkan
1.	Pelaku Usaha Nata de Coco "Salju"	SNI 01-4317-2018 tentang Nata dalam Kemasan

Sasaran 2: Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif

Indikator Kinerja :	Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan (Unit)
----------------------------	--

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa target jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan adalah 70 unit. Pada tahun 2025, BPMP RIAU melakukan kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS (target 70 ton) dengan realisasi 74.75 ton (106.78%). Varietas benih Sumber Padi Kelas SS yang dihasilkan antara lain: Biosalin 2 Agritan, Inpari 32 HDB, Inpari 34 Salin Agritan, Inpari 34 Salin Agritan, Inpari 49 Jembar, Inpari 50 Marem, Cakrabuana Agritan dan Logawa.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

***Indikator Kinerja :* Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret.

Pada tahun anggaran 2025, BPMP RIAU memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM sebesar 85. Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada tahun 2025, BPMP RIAU memperoleh nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebesar 85.53 (100.62 %). Adapun SK Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian

Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 terlampir.

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau adalah 91.00. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (berdasarkan regulasi yang berlaku) diperoleh dari aplikasi Kementerian Keuangan yang beralamat <https://spanint.kemenkeu.go.id> sebesar 97.74. Nilai tersebut diperoleh dari indikator kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA), kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP) serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output) (Gambar 3.2).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

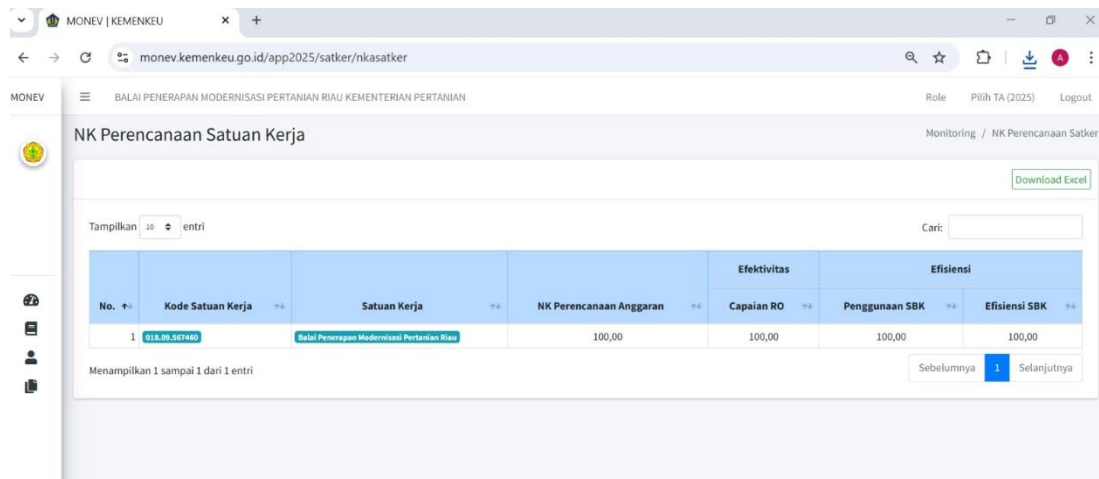
Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	018	567460	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU	Nilai	100.00	88.16	97.58	100.00	100.00	100.00	100.00	97.74	100%	0.00	97.74
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.22	19.52	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.08		99.40				100.00				

Gambar 3. 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP RIAU per 31 Desember 2025

3.1.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, yang dilihat dari NK Perencanaan Satuan Kerja di aplikasi Monev Kemenkeu, diperoleh NK Perencanaan Anggaran 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang disusun telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun NK Perencanaan Anggaran BPMP Riau disajikan pada Gambar 3.2.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efisiensi		
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	018.00.357400	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3. 2 NK Perencanaan Anggaran BPMP Riau Tahun 2025

3.1.3. Kinerja Hasil Kegiatan BPMP RIAU TA 2025

1. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Riau

Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Riau dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki luas wilayah 11.605,96 km² atau setara dengan 1.160.597 Ha, sub sektor perkebunan merupakan sektor unggulan hal ini didukung oleh distribusi lapangan pekerjaan masyarakat Indragiri Hilir yang mayoritas bergerak di sektor pertanian. Areal perkebunan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, sagu, nipah, pinang, kakao dan kopi. Perkebunan kelapa merupakan areal terluas di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 340.774 ha atau 56.95% dari komoditas perkebunan lainnya. Penduduk kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar atau 75% menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa.

Salah satu produk dari kelapa adalah *nata de coco*, pembuatan *nata de coco* dari air kelapa sebagai bahan baku utamanya telah dilakukan oleh beberapa pelaku usaha

di Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun belum banyak diusahakan namun mempunyai prospek yang menjanjikan. BPMP RIAU melakukan pendampingan SNI 01-4317-2018 tentang Nata dalam Kemasan melalui sosialisasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 yang bertempat di AULA BPP Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Tema acara adalah sosialisasi SNI 01-4317-2018 dan SNI Bina UMK yang dihadiri oleh 25 orang pelaku usaha yang bergerak dibidang hilirisasi kelapa. Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan pengisian kuisioner terhadap peserta terkait kegiatan usaha turunan kelapa yang mereka tekuni, seperti usaha *nata de coco*, gula kelapa, kopra dan VCO (*virgin coconut oil*).

Narasumber kegiatan sosialisasi adalah Kepala Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Riau, Andiko, ST. Materi yang disampaikan adalah Upaya UMKM "Naik Kelas" melalui Standardisasi Produk. Selanjutnya dilaksanakan kunjungan ke pelaku usaha *Nata de Coco* "Salju". Beberapa hal dikoreksi oleh narasumber terkait proses produksi sesuai standar mutu jika usaha akan ditingkatkan untuk mendapatkan SNI bina UMK maupun SNI reguler. Diharapkan kegiatan ini akan memotivasi UMKM untuk meningkatkan mutu produk sehingga dapat bersaing di pasar domestik maupun ekspor.

Tim BPMP RIAU selanjutnya melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen SNI Bina UMK pada pelaku usaha *Nata de Coco* merk "Salju" yang terletak di jalan Pekan Arba Gang Rahmat Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Proses pendampingan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kantor Layanan Teknis BSN Riau untuk memastikan proses sertifikasi SNI Bina UMK produk *Nata de Coco* yang dimaksud berjalan dengan baik. Setelah semua dokumen terpenuhi, sertifikat SNI Bina UMK untuk produk *Nata de Coco* yang didampingi telah terbit. Pihak UMK mulai sejak terbit sertifikat tersebut telah diperbolehkan mencantumkan logo SNI Bina UMK pada kemasan produknya. Pernyataan Mandiri SNI Bina UMK Pelaku Usaha Nata de Coco "Salju" terlampir.





Gambar 3. 3 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Riau

2. Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS

Kegiatan produksi benih sumber padi kelas SS adalah menyediakan benih padi sumber padi kelas SS sebanyak 70 ton dan mendistribusikan benih sumber padi kelas SS kepada penangkar/petani. Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan, pendaftaran dan registrasi kegiatan produksi benih sumber padi kelas SS ke UPT PSBTPH Provinsi Riau, koordinasi kegiatan, pemilihan calon petani dan calon lokasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan lapangan, prosesing benih, sertifikasi benih/pengujian mutu benih serta pelabelan dan pengemasan/pengepakan benih. Seluruh tahapan kegiatan produksi benih mengacu pada SNI 8969:2021 tentang *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP) atau Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan SNI 9356-2025 tentang Produksi Benih Padi. Selanjutnya, kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS yang dilaksanakan oleh petani penangkar/kelompok tani didampingi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berwenang sesuai Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. Benih yang telah dikemas dan berlabel (bersertifikat) didistribusikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Stok benih yang masih ada akan disimpan di gudang milik UPBS BPMP RIAU di Pekanbaru. Prosedur pendistribusian benih dilakukan dengan membuat permohonan bantuan dari kelompok tani yang diketahui oleh Kepala BPP/koordinator penyuluh atau kepala desa. Apabila persyaratan surat permohonan benih sudah disetujui oleh kepala BPMP RIAU, maka benih akan segera didistribusikan kepada penangkar, kelompok tani/petani yang sesuai dengan alamat pemohon.

Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Kabupaten Siak seluas 31.25 ha dan Kabupaten Kampar seluas 1 ha. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin kualitas benih yang dihasilkan, yaitu melalui pemilihan benih sumber yang harus berasal dari produsen yang dipercaya dan sudah berskala nasional. Benih sumber padi untuk kebutuhan kegiatan perbenihan UPBS BPMP RIAU berasal dari BRMP Padi Subang, BPMP Banten, PB Srindo Karawang dan CV. Andalan Tanindo Utama Aceh. Benih yang dipesan merupakan benih sumber yang bersertifikat Benih Penjenis (BS) dan Benih Dasar (FS).

Lahan yang digunakan dalam memproduksi benih sumber padi harus mendapat persetujuan dari PBT kabupaten atau petugas UPT. PSBTPH Provinsi Riau. Petugas PBT/UPT.PSBTPH Provinsi Riau melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap lahan dan persyaratan lain yang diperlukan untuk proses sertifikasi. Penilaian utama dari petugas PBT/UPT.PSBTPH adalah kelayakan lahan untuk digunakan sebagai lokasi untuk memproduksi benih sumber. Setelah lahan disetujui oleh petugas PBT untuk produksi benih sumber, maka dilakukan persiapan lahan dengan penyemprotan gulma dan perbaikan pematang sawah. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan tanah sempurna dengan cara membajak lahan menggunakan traktor. Pengolahan tanah dilakukan dengan 2 kali bajak dan 1 kali garu, hingga lahan siap untuk ditanam. Lahan yang siap tanam ditandai dengan permukaan sawah yang datar, bebas dari gulma, air macak-macak dan melumpur.



Gambar 3. 4 Pengolahan Tanah dan Pengawasan oleh Petugas UPT PSBTPH Provinsi Riau

Pembuatan tempat persemaian dilakukan bersamaan dengan persiapan lahan (penyemprotan gulma dan pengolahan tanah tahap pertama). Setiap 1 ha lahan produksi memerlukan tempat persemaian seluas 400 m². Benih diberi perlakuan benih

dengan cara merendam selama 12 jam. Kemudian air rendaman dibuang dan ditiriskan serta dilanjutkan dengan pemeraman selama 12 jam pula. Setelah pemeraman, biasanya kondisi benih sudah terlihat munculnya kecambah sekitar 1-2 mm. Penaburan dilakukan dengan hati hati dan merata di tempat persemaian.



Gambar 3. 5 Penaburan Benih di Tempat Persemaian Lokasi Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya

Penanaman padi dilakukan dengan cara manual (Gambar 4) dan menggunakan alat tanam *Rice Transplanter*. Terdapatnya dua pilihan penanaman ini disebabkan masih terbatasnya alat tanam *Rice Transplanter* dilokasi tersebut, sehingga sebagian masih menggunakan cara tanam manual. Penggunaan alat tanam *Rice Transplanter* lebih hemat dari segi pembiayaan dan lebih cepat dalam pelaksanaan penanamannya. Pelaksanaan penanaman didampingi oleh tim BPMP RIAU serta petugas dari UPT. PSBTPH Provinsi Riau/PBT, dan penyuluh.



Gambar 3. 6 Penanaman Benih Padi

Pemupukan dasar perbenihan padi dilakukan pada umur 2-7 hst. Pemupukan dasar menggunakan pupuk tunggal Urea (50 kg/ha), TSP (100 kg/ha) dan KCl (50

kg/ha) yang dicampur/diaduk merata, kemudian ditaburkan/disebar pada lahan produksi. Pemupukan susulan 1 dilaksanakan pada umur 20-25 hst dengan pemberian Urea 1/3 dosis (50 kg) dan KCl sebanyak 1/2 dosis (50 kg). Pupuk urea dan pupuk KCl diaduk merata, jika ditemukan bongkahan/gumpalan pupuk sebaiknya dihancurkan terlebih dahulu agar pencampurannya bisa merata. Setelah pupuk dicampur dan diaduk merata dilanjutkan dengan penaburan pada lahan sawah yang disebar secara merata. Pada saat melakukan pemupukan perlu memperhatikan ketinggian air dalam petakan, sekitar 1-2 cm dan ditutup semua pintu masuk dan pintu keluar air selama 3-4 hari. Pemupukan susulan ke 2 dilaksanakan pada umur 40-45 hst. Pemupukan pada fase ini hanya menggunakan pupuk urea 1/3 dari dosis anjuran. Sebelum pemupukan dilakukan pengendalian gulma terlebih dahulu. Pengendalian gulma menggunakan herbisida selektif dan juga dengan cara manual.



Gambar 3. 7 Pemupukan Padi Sawah

Hama yang dominan pada awal penanaman adalah keong yang masuk ke dalam petakan sawah melalui air irigasi pada saluran tersier. Hama keong bisa dikendalikan dengan pembuatan saluran keliling dan saluran cacing, sehingga dapat mempermudah pengendaliannya. Pengendalian keong menggunakan moluskisida seperti Bisnoid 60 WP, Keong Tox 250 EC, Mitran, dan Si Keong yang mengandung bahan aktif seperti Fentin Asetat atau Niclos Amida.



Gambar 3. 8 Pengendalian OPT

Pelaksanaan *roguing* dimulai pada fase vegetatif yang didampingi oleh penyuluh dan pengawas benih tanaman. *Roguing* fase generatif dilakukan pada awal fase pembungaan atau baru munculnya malai. *Roguing* fase masak (menjelang panen) adalah lanjutan dari pelaksanaan *roguing* sebelumnya. *Roguing* ini merupakan *roguing* terakhir selama masa pertanaman. *Roguing* pada fase ini diharapkan Campuran Varietas Lain (CVL) sudah tidak ada lagi.



Gambar 3. 9 *Roguing* Fase Masak

Pemeriksaan lapang dilakukan sebanyak 2 kali yaitu: pemeriksaan lapangan pendahuluan dan pemeriksaan pertanaman. Panen dilakukan sesuai dengan umur panen pada deskripsi masing-masing varietas. Panen dilakukan dengan menggunakan alat *Combine Harvester*. Untuk menjaga kemurnian benih, maka benih yang dihasilkan dari satu putaran alat *combine* dipisahkan letaknya dan pada karungnya diberi tanda silang (X).



Gambar 3. 10 Panen Padi

Tahapan processing benih dimulai dengan pengeringan/penjemuran. Benih yang dijemur di lapangan pada panas yang memerlukan waktu 4-5 hari untuk

mencapai kadar air antara 11-12%. Benih yang sudah kering langsung dibersihkan dengan menggunakan alat *seed cleaner*. Benih yang sudah kering dan bersih dilanjutkan dengan pengambilan sampel untuk uji mutu di laboratorium UPT. PSBTPH Provinsi Riau.



Gambar 3. 11 Prosessing Benih Padi

Benih yang diuji di laboratorium UPT.PSB-TPH Provinsi Riau dinyatakan lulus sebanyak 74,75 ton. Benih yang telah lulus sertifikasi kemudian dilanjutkan dengan pencetakan label. Setelah itu, benih ditimbang per 5 kg dan dikemas kedalam kantong plastik kedap udara menggunakan *sealer* dan dilakukan pemasangan 1 label per kemasan oleh PBT UPT.PSBTPH Provinsi Riau. Data produksi benih sumber kelas SS Tahun 2025 terdapat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS

No	Varietas	Tonase
1.	Biosalin 2 Agrirtan	9.73
2.	Inpari 32 HDB	19.36
3.	Inpari 34 Salin Agritan	4.91
4.	Inpari 34 Salin Agritan	5.52
5.	Inpari 49 Jembar	4.63
6.	Inpari 50 Marem	6.31
7.	Cakrabuana Agritan	5.24
8.	Logawa	19.05
Jumlah		74.75



Gambar 3. 12 Benih Padi Kelas SS yang Telah Tersertifikasi

3. Pendampingan Program Strategis Kementan

Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan bertujuan untuk : mendampingi Kegiatan Oplah di 6 Kabupaten (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti) seluas 22.726,79 ha, mendampingi Luas Tambah Tanam di 12 Kabupaten/Kota 86.300 ha, mendampingi Tanam Padi Gogo di 12 Kabupaten/Kota 5.639,60 ha, membentuk dan mendampingi 93 Brigade Pangan.

Pada tahap awal kegiatan Oplah, BPMP RIAU mendampingi kegiatan SID sebagai dasar penentuan kelayakan teknis lokasi Oplah Rawa. Tim BPMP RIAU bersama tim SID Oplah melakukan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi topografi, karakteristik tanah, sistem hidrologi, potensi aliran air, serta aksesibilitas lokasi. Hasil SID menjadi acuan untuk menentukan kebutuhan intervensi fisik seperti pembuatan saluran drainase, pintu air, ataupun perbaikan tata air di lahan rawa. Setelah dokumen SID disetujui dan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan, BPMP RIAU melakukan monitoring pada tahap konstruksi lahan. Pada fase ini, monitoring memastikan bahwa pembangunan infrastruktur optimasi, seperti pembuatan saluran drainase, penataan lahan, dan perbaikan tanggul, dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis.



Gambar 3. 13 Tim BPMP Riau mendampingi SID di Kabupaten Indragiri Hilir

Setelah konstruksi lahan selesai, BPMP RIAU melanjutkan pendampingan pada tahap percepatan tanam. Pada fase ini, pendamping memastikan bahwa lahan Oplah segera dimanfaatkan untuk pertanaman sesuai jadwal tanam yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. BPMP RIAU bekerja sama dengan dinas kabupaten/kota dan penyuluh untuk mendampingi Brigade Pangan (BP) dan kelompok tani dalam persiapan tanam. LO BPMP RIAU juga memastikan ketersediaan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, alat mesin pertanian (alsintan), serta membantu mengatasi kendala lapangan yang menghambat percepatan tanam, seperti tergenangnya lahan, cuaca tidak menentu, atau keterlambatan distribusi benih.

Pendampingan percepatan tanam juga meliputi monitoring awal pertumbuhan tanaman, pendampingan penerapan teknologi budidaya rawa, serta pelaporan perkembangan kegiatan secara berkala. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa lahan yang telah dioptimalkan dapat segera memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan luas tanam dan produksi.



Gambar 3. 14 Percepatan Tanam Oplah dan Pendampingan Teknologi



Gambar 3. 15 Pengendalian Hama Tikus di Lokasi Oplah Indragiri Hulu

Sampai tanggal 29 Desember 2025, telah tercapai luas tanam Oplah 26.078,2 ha atau 113,1% dari target seluas 22.726,79 ha. Dimana Indragiri Hilir mencatat Oplah terluas yaitu 9.205,9 ha, diikuti Rokan Hilir seluas 8.772,0 ha.

Tabel 3. 6 Perkembangan Oplah sampai 29 Desember 2025

No.	Kabupaten/Kota	Target (ha)	Realisasi (ha)
1	Kuantan Singingi	-	-
2	Indragiri Hulu	253	278,0
3	Indragiri Hilir	6.931	9.205,9
4	Pelalawan	4.431	4.506,0
5	Siak	664	702,5
6	Kampar	-	-
7	Rokan Hulu	155	154,8
8	Bengkalis	-	-
9	Rokan Hilir	8.168	8.772,0
10	Kepulauan Meranti	2.459	2.459,0
11	Kota Pekanbaru	-	-
12	Kota Dumai	-	-
TOTAL		23.060	26.078,2

Data Luas Tambah Tanam (LTT) diperoleh melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang dimulai dari tingkat lapangan. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan pendataan langsung di wilayah kerja masing-masing dengan memantau dan mencatat setiap aktivitas tanam padi yang berlangsung. Data tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada Dinas Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota untuk diverifikasi dan direkap. Selanjutnya, laporan yang telah dikompilasi di tingkat Kabupaten/Kota diteruskan kepada Dinas Pertanian Provinsi untuk dilakukan konsolidasi data seluruh wilayah. Setelah melalui proses validasi dan pengolahan di tingkat provinsi, data LTT ini kemudian dilaporkan secara

resmi kepada Kementerian Pertanian sebagai bahan evaluasi, pemantauan capaian target, serta perumusan kebijakan pada tingkat nasional.

Tabel 3. 7 Realisasi LTT Provinsi Riau per 29 Desember 2025

No.	Kabupaten / Kota	Target Jan-Des 2025	Total Jan-Juni	Realisasi							Capaian (%)
				Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	29'Des	Total Jan-Des	
1	Kuantan Singingi	7.197	5.854,6	260,0	25,5	159,0	483,0	70,0	150,5	7.002,6	97,30
2	Indragiri Hulu	2.259	1.243,2	152,8	11,3	150,0	18,0	50,3	198,0	1.823,6	80,72
3	Indragiri Hilir	25.621	13.667,0	900,0	561,5	1.449,5	242,5	84,0	342,5	17.247,0	67,32
4	Pelalawan	5.859	1.743,0	73,0	1,0	-	572,0	173,0	5,0	2.567,0	43,81
5	Siak	10.297	5.274,4	1.369,5	257,5	466,5	429,3	1.568,5	395,5	9.761,2	94,79
6	Kampar	6.246	4.322,0	1.025,0	995,0	694,0	379,0	36,0	43,0	7.494,0	119,98
7	Rokan Hulu	4.153	928,2	63,8	7,0	1.098,2	255,9	287,2	128,0	2.768,3	66,65
8	Bengkalis	4.924	1.571,0	361,7	493,7	694,4	496,0	159,0	28,5	3.804,3	77,25
9	Rokan Hilir	15.071	6.132,0	74,0	60,0	372,0	574,0	1.047,0	281,0	8.540,0	56,67
10	Kepulauan Meranti	3.175	836,0	36,0	56,0	428,3	173,0	14,0	-	1.543,3	48,61
11	Pekanbaru	55	15,0	-	-	-	-	-	-	15,0	27,44
12	Kota Dumai	1.443	97,0	25,0	-	38,0	250,0	113,0	10,0	533,0	36,94
	TOTAL	86.300	41.683,4	4.340,8	2.468,5	5.549,9	3.872,7	3.602,0	1.582,0	63.099,3	73,12

Berdasarkan data capaian LTT reguler Provinsi Riau hingga 29 Desember 2025, total realisasi mencapai 63.099,3 ha atau 73,12% dari target provinsi sebesar 86.300 ha. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa Riau masih memerlukan percepatan tanam pada akhir tahun untuk mendekati target tahunan. Kabupaten Kampar menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yaitu 119,98%, karena mampu memanfaatkan momentum tanam pada Juli hingga November. Capaian tinggi juga terlihat pada Kabupaten Kuantan Singingi (97,30%) dan Kabupaten Siak (94,79%), yang konsisten menambah luas tanam sepanjang tahun. Sebaliknya, beberapa daerah masih jauh dari target, seperti Kota Pekanbaru (27,44%), Kota Dumai (36,94%), Pelalawan (43,81%), dan Kepulauan Meranti (48,61%).

Dari sisi kontribusi terhadap total realisasi, Indragiri Hilir menjadi penyumbang terbesar dengan luas tanam 117.247 ha, diikuti Kampar, Siak, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir. Meski kontribusinya besar, beberapa kabupaten dengan target tinggi seperti Indragiri Hilir dan Rokan Hilir belum mencapai 70%, sehingga sangat mempengaruhi capaian provinsi secara keseluruhan. Pola tanam bulanan

menunjukkan bahwa puncak penambahan luas tanam terjadi pada September, dengan kontribusi signifikan juga pada Juli, Oktober, dan November. Semester I (Januari–Juni) memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi, yakni 41.683 ha, sedangkan semester II lebih fluktuatif namun tetap memberikan dorongan melalui periode puncak tanam.

Secara keseluruhan, capaian LTT provinsi sudah menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan optimalisasi potensi tanam di wilayah dengan capaian rendah. Percepatan tanam menjelang akhir tahun perlu difokuskan pada kabupaten dengan target besar namun capaian masih rendah seperti Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Pelalawan. Penguatan koordinasi lintas sektor, pendampingan lapangan, serta pemanfaatan pola tanam adaptif pada lahan gambut dan rawan banjir diperlukan agar target tahunan dapat lebih mendekati realisasi optimal.

Capaian LTT reguler yang relatif rendah di beberapa kabupaten/kota, dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan benih unggul, serta karakteristik wilayah yang didominasi lahan rawa dan gambut dengan fluktuasi tinggi muka air. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan dan ketidakteraturan waktu tanam. Selain itu, keterbatasan infrastruktur tata air, akses jalan usaha tani, serta belum optimalnya kapasitas dan kelembagaan petani dalam menerapkan tanam serempak turut menghambat percepatan tanam. Faktor perencanaan target yang belum sepenuhnya berbasis potensi riil wilayah dan keterlambatan dukungan kegiatan pendukung juga mempengaruhi persentase capaian, sehingga diperlukan penyesuaian target dan pendekatan spesifik lokasi untuk meningkatkan kinerja LTT ke depan.



Gambar 3. 16 Gerakan Percepatan Tanam di Kabupaten Indragiri Hilir



Gambar 3. 17 Gerakan Percepatan Tanam di Kabupaten Kampar

Upaya swasembada pangan tidak hanya mengoptimalkan lahan sawah dengan penanaman padi sawah namun juga memanfaatkan lahan kering termasuk lahan replanting kelapa sawit untuk penanaman padi gogo.

Berdasarkan data LTT padi gogo Provinsi Riau, terlihat bahwa terdapat variasi capaian dan potensi tanam antar kabupaten/kota yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, total realisasi padi gogo di Riau mencapai 3.176,5 ha, sementara pada tahun 2025 pusat telah menyetujui CPCL seluas 7.250 ha dan menetapkan revisi target 5.639,6 ha. Capaian hingga akhir Desember adalah 4.553,53 ha atau 80,74%. Kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Rokan Hulu dengan luas tanam 1.733,4 ha, yang menunjukkan peran strategis wilayah ini dalam mendukung pencapaian target luas tanam. Selanjutnya, Kabupaten Indragiri Hilir mencatat luas tanam sebesar 681 ha, diikuti Kabupaten Kampar seluas 637,5 ha, serta Kabupaten Pelalawan sebesar 435 ha. Beberapa daerah lain memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil, antara lain Kabupaten Rokan Hilir dengan luas tanam 400 ha, Kota Dumai seluas 251,5 ha, Kabupaten Indragiri Hulu 181 ha, Kabupaten Bengkalis 93 ha, Kabupaten Kuantan Singingi 54,23 ha, dan Kabupaten Siak 50,4 ha. Sementara itu, Kota Pekanbaru mencatat luas tanam 36,5 ha. Secara keseluruhan, sebaran luas tanam ini menunjukkan adanya variasi kontribusi antarwilayah, dengan beberapa kabupaten menjadi sentra utama dan wilayah lainnya masih memiliki peluang untuk ditingkatkan melalui penguatan pendampingan dan optimalisasi potensi lahan.

Secara keseluruhan, capaian padi gogo Provinsi Riau menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten masih perlu mengoptimalkan realisasi tanam agar lebih sejalan dengan CPCL dan target revisi pusat.

Tabel 3. 8 Realisasi LTT Padi Gogo Provinsi Riau per Desember 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas Tanam (ha)
1	Kuantan Singingi	54,23
2	Indragiri Hulu	181
3	Indragiri Hilir	681
4	Pelalawan	435
5	Siak	50,4
6	Kampar	637,5
7	Rokan Hulu	1733,4
8	Bengkalis	93
9	Rokan Hilir	400
10	Kepulauan Meranti	0
11	Kota Pekanbaru	36,5
12	Kota Dumai	251,5
	TOTAL	4.553,53



Gambar 3. 18 Gerakan Percepatan Tanam Padi di Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar



Gambar 3. 19 Gerakan Percepatan Tanam Padi Gogo di Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru

Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Brigade Pangan merupakan tahapan penting dalam memperkenalkan sekaligus menginisiasi gerakan bersama untuk

mewujudkan swasembada pangan. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh kepada para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga masyarakat, mengenai konsep, fungsi, serta mekanisme kerja Brigade Pangan.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui forum tatap muka yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif. BPMP RIAU sebagai fasilitator utama memaparkan latar belakang lahirnya Brigade Pangan, strategi pemanfaatan lahan rawa secara optimal, serta peran yang akan dijalankan oleh masing-masing anggota. Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik di lapangan agar model Brigade Pangan yang terbentuk benar-benar relevan dan aplikatif.

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Brigade Pangan. Proses ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Dinas Pertanian setempat, penyuluh, dan kelompok tani. Struktur organisasi Brigade Pangan ditetapkan, termasuk penunjukan manajer, bidang, serta mekanisme kerja. Dengan terbentuknya Brigade Pangan, diharapkan lahir sebuah wadah kolaboratif yang solid untuk mengawal program peningkatan produksi pangan, mendukung diversifikasi usaha tani, dan memperkuat kemandirian pangan masyarakat. Pada tahun 2024 telah terbentuk Brigade Pangan sebanyak 18 BP. Sedangkan pada tahun 2025 telah terbentuk sebanyak 68 BP.

Tabel 3. 9 Jumlah Brigade Pangan di Provinsi Riau Tahun 2025

No	Kabupaten	Jumlah BP
1	Indragiri Hilir	34
2	Indragiri Hulu	2
3	Pelalawan	16
4	Kepulauan Meranti	4
5	Rokan Hilir	27
Total		83

Kegiatan Pendampingan Brigade Pangan merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa program Brigade Pangan dapat berjalan efektif, sesuai dengan tujuan peningkatan indeks pertanaman, produktivitas, pemanfaatan lahan rawa, serta swasembada pangan. Pendampingan ini tidak hanya sebatas memberikan arahan, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kapasitas petani. Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Brigade Pangan merupakan tahapan penting dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan keberlanjutan peran Brigade Pangan di lapangan. Melalui kegiatan ini, BPMP Riau bersama Dinas Pertanian Kabupaten melakukan peninjauan, pencatatan, serta analisis capaian program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan ke lokasi Brigade Pangan. Tim monev mengamati langsung kondisi pertanaman, pemanfaatan alat mesin pertanian, manajemen kelembagaan kelompok tani, hingga kendala teknis yang dihadapi petani. Hasil pengamatan ini dicatat sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk memberikan solusi maupun rekomendasi perbaikan.



Gambar 3. 20 Sosialisasi dan Pembentukan Brigade Pangan di Kab. Kepulauan Meranti



Gambar 3. 21 Pendampingan Brigade Pangan di Kabupaten Indragiri Hulu

Kegiatan koordinasi pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) jagung antara BPMP RIAU dan Polda Riau dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dalam percepatan tanam jagung di wilayah Provinsi Riau. Melalui koordinasi ini, kedua institusi menyepakati pentingnya kolaborasi dalam pendataan potensi lahan, pendampingan kegiatan tanam, serta percepatan implementasi program di lapangan.

BPMP RIAU berperan dalam pendampingan teknologi budidaya, sementara Polda Riau memberikan dukungan lahan, benih, pengawasan, serta penguatan koordinasi lintas pihak di tingkat kabupaten/kota. Sinergi BPMP RIAU dan Polda Riau ini diharapkan mampu meningkatkan capaian LTT jagung secara signifikan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produksi jagung di Provinsi Riau. Kegiatan Tanam Jagung Serentak di Provinsi Riau yang melibatkan Polri, Pemerintah Provinsi Riau (Gubri), dan BPMP RIAU merupakan wujud nyata kolaborasi strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Pelaksanaan tanam serentak ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan produksi jagung di daerah, khususnya melalui perluasan areal tanam, pemanfaatan lahan tidur, serta percepatan tanam pada lokasi-lokasi prioritas.



Gambar 3. 22 Pendampingan Pertanaman Jagung di lahan SPN oleh BPMP RIAU



Gambar 3. 23 Polri, Gubernur Riau dan BMP RIAU Tanam Jagung Serentak Dukung Swasembada Pangan

Dalam upaya mendukung Swasembada Pangan, BMP RIAU juga menerbitkan panduan “Inovasi Percepatan Tanam Padi” dalam bentuk infografis dan video. Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis agar petani memahami metode percepatan tanam, termasuk persiapan lahan, penanaman, pemilihan benih unggul, dan praktik budidaya yang efisien. Beberapa elemen “inovasi percepatan tanam” antara lain:

- Pemanfaatan benih unggul bersertifikat
- Penggunaan mekanisasi/alat mesin pertanian (alsintan) untuk membantu pengolahan lahan dan tanam cepat.
- Penentuan waktu tanam berdasarkan curah hujan.
- Pemanfaatan sisa jerami atau sisa tanaman (pascapanen) sebagai bahan organik/pembenah lahan, untuk menjaga kesuburan tanah, kelembapan, dan mendukung siklus tanam ulang cepat.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) persemaian
- SOP olah lahan dan tanam



Gambar 3. 24 Panduan Inovasi Percepatan Tanam BPMP RIAU

BPMP RIAU melaksanakan kegiatan demplot inovatif berupa padi apung, padi kolam, dan padi dalam pot yang ditempatkan di halaman kantor BPMP RIAU serta di kawasan Kantor Gubernur Riau sebagai media diseminasi teknologi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Demplot ini dirancang untuk menunjukkan bahwa budidaya padi tetap dapat dilakukan pada lahan suboptimal, termasuk lahan tergenang, pekarangan sempit, maupun area perkotaan.

Teknologi padi apung menampilkan konsep budidaya di atas media terapung yang cocok untuk wilayah rawa atau genangan, sementara padi kolam memanfaatkan kolam air sebagai tempat tumbuh tanaman sehingga memaksimalkan ruang yang ada tanpa mengganggu fungsi lahan. Adapun padi dalam pot menjadi contoh praktik urban farming yang mudah diterapkan oleh masyarakat umum di lingkungan rumah atau perkantoran.



Gambar 3. 25 Padi Kolam dan Padi dalam Pot di Halaman BPMP RIAU



Gambar 3. 26 Padi Apung di Halaman BPMP RIAU

Melalui kegiatan ini, BPMP RIAU tidak hanya mendemonstrasikan teknologi pertanian modern yang adaptif, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya inovasi untuk mendukung program swasembada pangan Provinsi Riau. Seluruh demplot berperan sebagai sarana edukasi praktis, memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memperluas adopsi teknologi pertanian, dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan produksi pangan lokal.



Gambar 3. 27 Demplot Padi Kolam di Halaman Rumah Dinas Gubernur Riau

BPMP RIAU juga melaksanakan rapat koordinasi kegiatan perbenihan di Provinsi Riau yang bertujuan untuk silaturahmi bersama *stakeholder* perbenihan khususnya penangkar, mendapat *feedback* dari penangkar tentang kondisi riil perbenihan saat ini di Provinsi Riau mulai dari proses produksi, pemasaran, permasalahan/kendala, harapan, dan solusi bersama dan mensinkronkan rencana penyediaan benih yang meliputi varietas yang akan digunakan, waktu tanam pengadaan benih, dan volume kebutuhan benih sebagai upaya mendukung swasembada pangan.

Peserta rakor sebanyak 27 orang yang mewakili petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani (Gapoktan)/BBI/perusahaan penangkar benih padi baik padi sawah maupun padi gogo se-Provinsi Riau. Rapat koordinasi perbenihan dibuka secara resmi oleh PJ Swasembada Pangan Provinsi Riau dan menghadirkan narasumber Kepala BPMP RIAU, Kabid TPH Provinsi Riau dan Kepala UPT PSBTPH Provinsi Riau.



Gambar 3. 28 Rakor Kegiatan Perbenihan BPMP RIAU

4. Operasional Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP)

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Riau memiliki 2 (dua) unit IP2MP yaitu IP2MP Siak Hulu berlokasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan IP2MP Sei Mandau berlokasi di Dusun Lubuk Tako, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak.

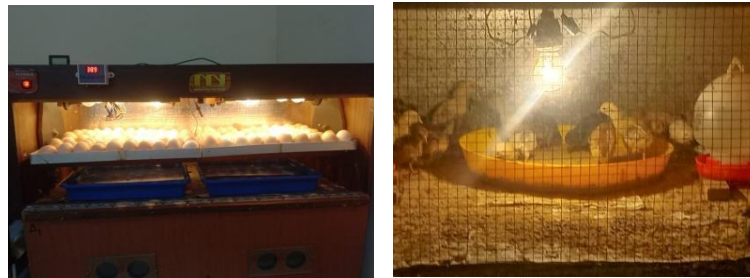
Penataan zonasi atau blok lahan yaitu pada IP2MP Siak Hulu, blok lahan pangan ditempatkan pada posisi depan lahan pada pintu masuk IP2MP Siak Hulu dan untuk tanaman sayuran ditempatkan dekat dengan kantor dan bangunan tempat tinggal petugas harian IP2MP. Penempatan zonasi dan blok lahan pangan dan sayuran dimaksudkan agar pemeliharaan lebih efektif disamping faktor keamanan lingkungan. Sedangkan pada IP2MP Sei Mandau, blok lahan sayuran dan pangan ditempatkan dekat dengan bangunan kantor sekaligus penataan keindahan lingkungan halaman gedung utama IP2MP Sei Mandau.

Lokasi blok tanaman pangan pada IP2MP Siak Hulu diitanami dengan padi gogo untuk perbenihan. Seluas kurang lebih 1 Ha lahan diperuntukkan untuk tanaman padi gogo yang terdiri atas 3 varietas yang ditanam. Perkembangan tanaman hingga akhir tahun cukup bagus dan belum panen. Pemanfaatan lahan ini dilakukan untuk menghasilkan benih padi gogo sesuai dengan varietas yang ditanam.

Pada lokasi IP2MP Sei Mandau yang melakukan percontohan penerapan standar instrumen budidaya Keladi Sinaboi maka penempatan zonasi dan blok lahannya dekat dengan bangunan kantor utama IP2MP Sei Mandau untuk memudahkan perawatan dan pengawalan. Penempatan blok lahan ini juga oleh karena pada lokasi dekat kantor hampir seluruh lahan sudah terbuka. Pada IP2MP Sei Mandau masih terdapat zonasi lahan seluas 4 Ha yang merupakan hutan belukar yang belum mampu dikelola dengan baik dan potensi kebakaran meningkat di musim kemarau.

Kegiatan *display* pembibitan ayam KUB-2 pada lokasi IP2MP Siak Hulu merupakan tahapan lanjutan dari pembesaran ayam KUB-2 pada tahun sebelumnya. Periode tahapan persiapan dan pelaksanaan *display* pembibitan ayam KUB-2 yaitu pemeliharaan calon indukan dari sejak bulan Januari - April 2025 dan kemudian periode pembibitan ayam KUB-2 dari bulan Mei - Agustus 2025. Penerapan standar instrumen yang dilakukan pada pembibitan ayam KUB-2 meliputi antara lain yaitu SNI 7783-2:2013 periode grower serta SNI 7783-2:2013 untuk pakan periode layer. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Jumlah pemberian pakan per hari yaitu 100 gr/ekor. Sementara untuk pembibitan ayam KUB-2 acuan yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI 845-1:2017 tentang standar bibit ayam umur sehari. Penerapan SNI ini meliputi umur induk dan pejantan yang digunakan untuk menghasilkan telur tetas yaitu minimal umur 7 bulan, telur tetas minimal berat 38 gr, ratio jantan dan betina minimal 1 : 5. Penetasan telur dilakukan dengan mesin tetas sebanyak 3 unit.

Produk instrumen terstandar yang dihasilkan pada *display* ini berupa telur tetas dan DOC ayam KUB-2. Sementara telur tetas yang dilepas ke masyarakat memenuhi standar berat telur tetas yaitu minimal 38 gr. Layanan masyarakat dari hasil *display* ini berupa pelayanan penyediaan produk instrumen terstandar. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan budidaya ayam KUB-2 di masing-masing lokasi oleh karena memperoleh DOC dan telur tetas yang standar.



Gambar 3. 29 *Display* Penerapan Standar Instrumen Pembibitan Ayam KUB-2

Kunjungan dan layanan masyarakat hasil *display* pembibitan ayam KUB-2 berlangsung sejak produksi DOC dan telur tetas dihasilkan. Kunjungan berlangsung saat masyarakat yang butuh DOC dan telur tetas datang ke lokasi IP2MP Siak Hulu. Layanan informasi dan hasil *display* Pembibitan Ayam KUB-2 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 10 Layanan Informasi Teknologi Terstandar dan Hasil *Display* Pembibitan Ayam KUB-2

No.	Uraian	Informasi/Data Teknis
1.	Layanan Informasi teknologi terstandar	Manajemen brooding, pola pemberian pakan, probiotik herbal, program vaksinasi
3.	Wilayah layanan informasi terstandar hasil <i>display</i>	Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir
4.	Daya Tetas Telur	Bervariasi antara 20% s/d 50%
5.	Berat Telur	35 gr - 55 gr

Display pemeliharaan kambing Boerka dilakukan pada lokasi IP2MP Siak Hulu sejak awal kedatangan kambing Boerka sekitar bulan Februari 2025. Saat datang kondisi kambing Boerka cukup bagus yang terdiri dari 2 ekor jantan dan 6 ekor betina. Kambing Boerka ditempatkan pada kandang pemeliharaan dan pemberian pakan

dilakukan setiap hari yaitu pada pagi dan sore hari. Jenis pakan yang diberikan secara umum adalah hijauan yang dikumpulkan serta hijauan pakan ternak unggul seperti *Indigofera Sp*, rumput *Setareioa* dan rumput odot. Pada setiap pemberian pakan diberikan yang telah dilarutkan serat air minum selalu tersedia di dalam kandang. Pembersihan kotoran dilakukan setiap hari serta kotoran kambing ditampung pada tempat khusus untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk kandang.

Hingga akhir tahun populasi yang ada yaitu sebanyak 9 ekor yang terdiri atas 2 ekor jantan, 6 ekor induk betina dan 1 ekor anak betina. Selama pemeliharaan yang berlangsung pada Tahun 2025 ini, 1 ekor induk betina melahirkan anak kambing sehat, dan terdapat 1 ekor induk betina melahirkan kembar namun anaknya mati. Perkembangan pemeliharaan kambing boerka dilakukan oleh petugas harian dengan bekerjasama dengan salah seorang masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi IP2MP Kubang Jaya. *Display* pemeliharaan budidaya kambing boerka seperti pada Gambar 3.29.



Gambar 3. 30 *Display* Pemeliharaan Budidaya kambing Boerka

3.1.4. Capaian Lainnya BPMP RIAU TA 2025

Selain pencapaian di indikator Perjanjian Kinerja, BPMP RIAU juga memiliki capaian berupa : Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Penerbitan sertifikat produk SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk, Nomor 56/7701/SRTF/I/2025 untuk Rumah produksi *My Limer Coffee*.

1. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Pemingkatan KIP dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada UK/ UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sekaligus menjadikan website dan portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat. Tahun 2025, pemingkatan KIP lingkup

Kementerian Pertanian BPMP RIAU memperoleh peringkat 5 unit kerja eselon III lingkup Kementerian Pertanian atau peringkat 1 lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian se-Indonesia.



Gambar 3. 31 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

2. Penerbitan sertifikat produk SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk, Nomor 56/7701/SRTF/I/2025 untuk Rumah produksi My Limer Coffee

Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau (Komoditas Kopi) dilaksanakan pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ini telah sertifikat produk SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk, Nomor 56/7701/SRTF/I/2025 pada tanggal 17 Januari 2025 untuk Rumah produksi My Limer Coffee. Dengan diperolehnya sertifikat ini, UMK *My Limer Coffee* dapat menggunakan tanda SNI pada kemasan produknya. Pada tahun 2025, BPMP RIAU tetap melakukan pendampingan untuk memastikan UMK *My Limer Coffee* konsisten dalam pelaksanaan SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk. Adapun sertifikat SNI terlampir.



Gambar 3. 32 Pendampingan BPMP RIAU ke My Limer Coffee pada tanggal 24 Oktober 2025

3.1.5. Kinerja Pelayanan Publik BPMP RIAU TA 2025

1. Layanan Laboratorium Pengujian

a. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium

Laboratorium BPMP RIAU menerima sampel analisa sebanyak 98 sampel yang terdiri dari sampel tanah dan pupuk organik. Konsumen berasal dari mahasiswa swasta, dan petani. Permohonan pengujian dari bulan Januari – Desember tahun 2025 dapat dilihat pada 3.12.

Tabel 3. 11 Permohonan Pengujian Laboratorium Tanah Bulan Januari s.d. Bulan Desember Tahun 2025

No	Tanggal	Nama/Alamat	Jenis Contoh	Jumlah Sampel	Jenis Analisa
1	08 Januari 2025	M Ardani Syahputra	Gambut	3	pH, N, P Tersedia dan K Tersedia
2	10 Januari 2025	Parsaoran Sinaga/Eko Nugroho	Tanah	1	pH, C Organik, N, P tersedia, K Tersedia
3	23 Januari 2025	PT. Tiara Kreasi Utama	Tanah	1	analisa tanah lengkap
4	04 Februari 2025	Legianto	Tanah	5	pH, N, P Tersedia, K Tersedia, P dan K Potensial dan KTK
5	24 Februari 2025	Kegiatan Kerjsama	Tanah	1	analisa tanah lengkap
6	03 Maret 2025	Kegiatan SSP (Indragiri Hilir)	Tanah	1	Analisa tanah lengkap
7	24 Maret 2025	Kegiatan Kerjsama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
8	24 Maret 2025	Hawa Merdika Agustin	Tanah	36	C Organik
9	24 Maret 2025	Githa Adennita Yulianti	Tanah	36	C Organik
10	24 April 2025	Lukenbill Luwinsky	Tanah	6	Analisa Lengkap kecuali Al dan H-dd
11	05 Mei 2025	Nurhayati	Tanah gambut	2	pH, C organik, N, P tersedia, P Potensial, KTK, Al, dan H-dd
12	27 Mei 2025	Kegiatan Kerjasama dengan Distan Indragiri Hilir	Tanah	1	pH, N, P dan K (menggunakan PUTS)
13	04 Juni 2025	Andro Sixmorning	Tanah	1	Analisa tanah lengkap
14	04 Juni 2025	Nasihin	Tanah	1	Analisa tanah lengkap
15	20 Juni 2025	Desy Sabila Putri	Kompos/pupuk organik	2	C Organik dan N Total
16	04 Juli 2025	Ray Zenezra Sitohang	Tanah	5	P Total

No	Tanggal	Nama/Alamat	Jenis Contoh	Jumlah Sampel	Jenis Analisa
17	15 Juli 2025	Friska Tarihoran	Tanah	5	C Organik, N, KTK, P2O5, Al dd, H-dd
18	26 September 2025	Ligianto	tanah	5	pH, C Organik, N-Kjedhal, P Tersedia, K-dd, P dan K Potensial dan KTK
19	06 Oktober 2025	Kerjasama Rokan Hilir	tanah	2	Analisa Lengkap
20	27 Oktober 2025	Riski Zustika	tanah	1	C Organik, N dan P,K (Potensial)
21	28 Oktober 2025	Fajrinal Hamid Ircan	Tanah	22	C Organik
22	24 November 2025	BAPPEDA INDRAGIRI HILIR	Tanah		C Organik
23	24 November 2025	Kerjasama Rokan Hilir		1	Analisa Lengkap
24	24 November 2025	Anis Fahri		3	Analisa Lengkap
Jumlah Sampel				155	

b. Persiapan Akreditasi Laboratorium

Perubahan nomenklatur dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mengakibatkan perubahan pada dokumen Akreditasi Laboratorium Pengujian BPMP RIAU. Perubahan ini juga diikuti dengan perubahan pimpinan BPMP RIAU.

Persiapan yang telah dilaksanakan untuk akreditasi laboratorium pengujian BPMP RIAU antara lain :

1) Rapat anggota tim dalam rangka persiapan akreditasi labor

Rapat persiapan akreditasi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025.

Pokok bahasan dalam rapat ini antara lain :

- a. Realisasi anggaran Laboratorium pengujian dan perencanaan usulan bahan bahan pengujian
- b. Progress pengujian sampel
- c. Perencanaan validasi metode
- d. Perencanaan Audit internal
- e. Evaluasi survey laboratorium pengujian



Gambar 3. 33 Rapat Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian BPMP RIAU

2) Bimbingan Teknis Validasi Metode

Validasi Metode merupakan proses untuk menetapkan persyaratan suatu analisa dan mengkonfirmasinya bahwa metode yang bersangkutan memiliki kemampuan yang konsisten dengan persyaratan tujuan penggunaannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keakurasian terhadap data hasil uji yang didapat.

Kegiatan bimbingan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025 yang bertempat di BPMP RIAU. Tujuan dilaksanakan bimbingan teknis ini yakni dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelola laboratorium pengujian untuk pemenuhan klausul 7.2 pada persyaratan ISO/IEC 17025:2017 tentang validasi metode yang tidak baku.

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh seluruh anggota tim laboratorium pengujian BPMP RIAU, adapun yang menjadi narasumber pada bimbingan Teknis ini berasal dari UPT Pegujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Pada Bimtek ini dijelaskan karakteristik kinerja validasi data yang meliputi : presisi dan akurasi, linieritas dan rentang kerja, sensitivitas dan selektivitas serta estimasi ketidakpastian.



Gambar 3. 34 Bimbingan Teknis Validasi Metode

3) Perbaikan dokumen mutu

Perbaikan dokumen mutu untuk akreditasi laboratorium SNI/ISO 17025 : 2017 meliputi :

- a. Dokumen panduan mutu
- b. Dokumen Prosedur
- c. Dokumen Instruksi Kerja
- d. Dokumen Formulir

4) Pengujian untuk validasi metode

Proses validasi Metode Laboratorium pengujian yakni melaksanakan pengujian sebanyak 10 kali ulangan dengan parameter :

- Kadar Air
- pH
- C Organik
- Nitrogen
- KTK

5) Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium

Peningkatan kapasitas SDM laboratorium yang telah dilaksanakan semester ini yakni Seminar Alat *Nitrogen Relyzer Gerhard* dengan pendekatan inovatif Metode Dumas. Kegiatan ini diikuti oleh 2 orang analis dari BPMP RIAU yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025. Seminar ini bertujuan memberikan wawasan baru mengenai pemanfaatan teknologi analitik canggih dalam industri pupuk dan kelapa sawit, sesuai standar SNI dan kebutuhan inovasi di sektor agrikultur.

Narasumber dari seminar ini antara lain : Asesor Manajemen Mutu Industri BSPJI Pekanbaru, VP Laboratorium PUSRI Palembang dan Product Specialist PT Gerhardt Global Indonesia dengan materi teknologi Nitrogen Analyzer terbaru.



Gambar 3. 35 Seminar Nitrogen Analyzer N-Relyzer Gerhard Metode Dumas

6) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Secara Rutin

Laboratorium Pengujian BPMP RIAU melaksanakan kegiatan kalibrasi rutin terhadap sejumlah peralatan laboratorium. Peralatan yang dikalibrasi meliputi oven, timbangan, dan pH meter. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen laboratorium untuk memastikan seluruh instrumen bekerja dengan akurat dan sesuai standar pengujian.

Proses kalibrasi dilakukan oleh tim dari BSPJI (Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri) Pekanbaru yang memiliki kewenangan dalam pengujian, penilaian, dan penjaminan mutu peralatan. Tim teknis melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja setiap alat, termasuk stabilitas, akurasi, dan konsistensinya. Seluruh prosedur dijalankan sesuai standar yang berlaku untuk menjamin hasil yang valid.

Kegiatan kalibrasi ini menjadi langkah penting bagi BPMP RIAU dalam menjaga mutu layanan laboratoriumnya. Dengan alat yang terkalibrasi dengan baik, hasil analisis yang dihasilkan akan lebih presisi, sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan penelitian, monitoring, maupun pelayanan teknis yang memerlukan data akurat. Upaya ini juga memperkuat kepercayaan pihak yang menggunakan layanan laboratorium

2. Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian serta Modernisasi Pertanian

Perubahan unit kerja menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdapat penambahan tugas dan fungsi pada aspek modernisasi pertanian. Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yang telah dilaksanakan dan tugas fungsi

baru terkait pertanian modern memerlukan diseminasi untuk penyebarluasan informasi.

Diseminasi yang dilaksanakan dapat melalui berbagai media seperti media tercetak (brosur, leaflet, infografis, dan spanduk) dan media elektronik (website, youtube, dan media sosial). Dengan diseminasi diharapkan penerapan standar instrumen pertanian dan pertanian modern dapat diterapkan oleh petani, masyarakat, stakeholder, maupun pelaku usaha.

Pada bulan Januari – Desember 2025, pelaksanaan kegiatan dengan mendiseminasikan video penerapan standar instrumen pertanian dan modernisasi pertanian sebagai berikut.

Tabel 3. 12 Rekap Diseminasi Video Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Modernisasi Pertanian

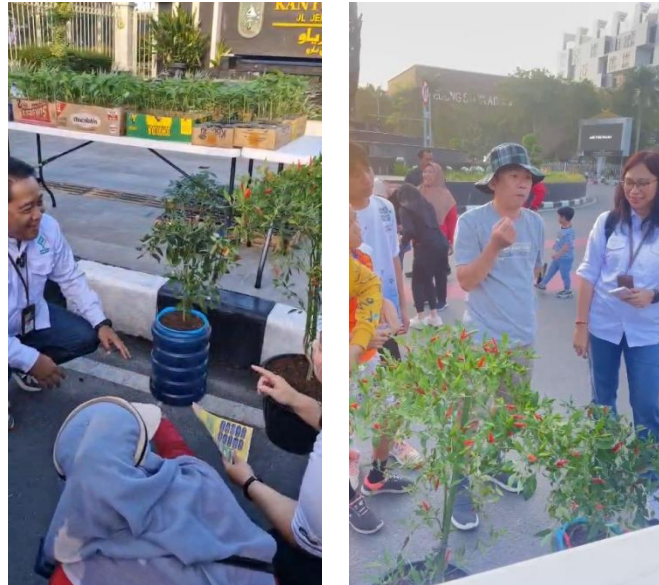
No	Judul Video	Tanggal Upload	Media Diseminasi
1	Bantuan Alsintan Brigade Pangan	11 Juni 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
2	Sobat Tani Peternak Pemula?? Ini dia Kambing Boerka Ternak Unggul di Kebun Percobaan BPMP RIAU (SNI 7352-5:2023 "Bibit kambing - Bagian 5: Boerka Galaksi Agrinak"	28 Juni 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
3	Kompos dari Sampah Organik	12 Juli 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
4	Kompos Si Pembengah Tanah Tingkatkan Produktivitas	20 Juli 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
5	Inovasi Percepatan Tanam BPMP RIAU	27 Agustus 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
6	Inovasi Percepatan Tanam dari BPMP RIAU (Hemat Air, Hemat Tenaga dan Hemat Biaya)	31 Agustus 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
7	Kegiatan Diseminasi : Pengelolaan Informasi Publik (Bahasa Isyarat)	19 September 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
8	Pendampingan Peneraan SNI 8964-2021 Kopi Bubuk Liberika Meranti (Bahasa Isyarat)	22 September 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X

No	Judul Video	Tanggal Upload	Media Diseminasi
9	Tanam Cabai Irigasi Kapiler	14 Oktober 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
10	Kegiatan Diseminasi : Pelayanan Publik BPMP RIAU (Bahasa Isyarat)	23 Oktober 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
11	Tanam Padi di Polibag	11 November 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
12	Kegiatan Diseminasi : Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik BPMP RIAU (Bahasa Isyarat)	17 November 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
13	BPMP RIAU Gelar Rapat Koordinasi Kegiatan Perbenihan : Dorong Optimalisasi Produksi Benih Insitu Di Riau	19 November 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
14	Naik Kelas, Liberika Meranti Tembus Pasar Dunia	19 November 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
15	Modernisasi Pertanian dalam Rangka Agrifest Setahun BRMP	30 November 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
16	Pembagian Benih Cabai dalam Rangka Agrifest Setahun BRMP	2 Desember 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X
17	Diseminasi pada Kunjungan Siswa di Taman Agromodern BRMP	4 Desember 2025	Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembuatan 17 video untuk diseminasi penerapan standar instrumen pertanian, pengelolaan produk hasil, dan pertanian modern. Terdapat 5 video yang dilengkapi bahasa isyarat untuk memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Video meliputi diseminasi standar instrumen pertanian berupa SNI 8964-2021 Tentang Kopi Bubuk, SNI 7352-5:2023 "Bibit kambing - Bagian 5: Boerka Galaksi Agrinak". Video diseminasi pertanian modern terkait alsintan, pembuatan kompos, inovasi percepatan tanam, pertanaman cabai kapiler, penanaman padi polibag serta diseminasi terkait pembagian benih cabai, kunjungan siswa, kegiatan perbenihan padi, dan pelayanan publik BPMP RIAU.

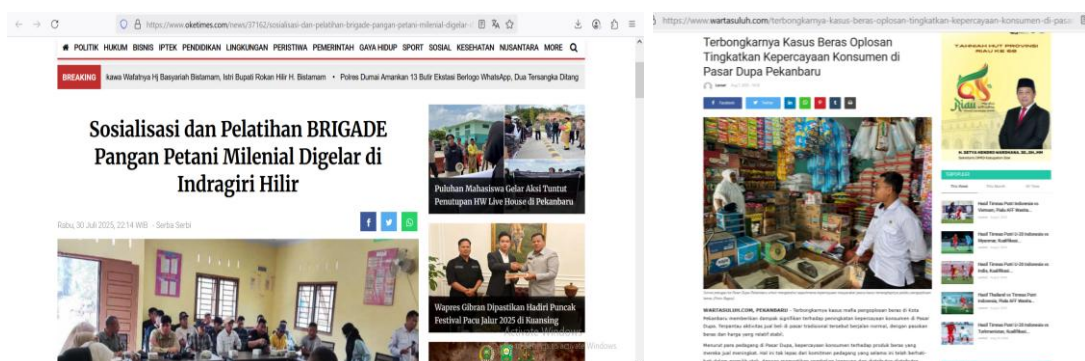
BPMP RIAU juga membuat percontohan/ *display* untuk penerapan modernisasi pertanian komoditas tanaman cabai. Kegiatan ini untuk mendukung program ketahanan pangan dan antisipasi inflasi pada cabai di Provinsi Riau. Percontohan

berupa budidaya cabai dalam polibag atau pot dan budidaya cabai dengan metode irigasi kapiler. Diseminasi telah dilakukan menggunakan media sosial (Facebook, Instagram, youtube, Tiktok dan X) dan secara langsung pada acara Car Free Day (CFD) di Pekanbaru serta pada saat pembagian benih cabai gratis di Kota Pekanbaru.



Gambar 3. 36 Diseminasi Pertanian Modern

Publikasi media online dilaksanakan sebanyak 2 kali tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPMP RIAU dan Kementerian Pertanian (Lampiran 1). Publikasi pada media online : gomediku, oketimes.com, wartasuluh.com. BPMP RIAU juga menjalin kerjasama dengan Riau TV dalam diseminasi standar instrumen pertanian dan modernisasi pertanian dalam program “Tani Keren” sebanyak 2 kali.





Gambar 3. 37 Kegiatan BPMP RIAU di Media Online dan Riau TV “Tani Keren”

BPMP RIAU telah memanfaatkan website dan media sosial (facebook, Instagram, Youtube) untuk mendiseminasikan informasi pertanian. Updating website dan medsos dilaksanakan secara rutin.

Tabel 3. 13 Updating Berita Website dan Media Sosial

Bulan	Website	FB	IG	Youtube
Januari	39	73	73	12
Februari	31	92	92	14
Maret	34	95	95	17
April	52	117	117	13
Mei	35	133	133	18
Juni	30	92	92	10
Juli	11	100	100	24
Agustus	20	104	104	8
September	19	79	79	9
Oktober	23	106	106	13
November	20	74	74	11
Desember	30	99	99	8
Total	344	1.164	1.164	157

Updating berita di website dan media sosial BPMP RIAU berupa kegiatan rutin, kegiatan layanan BPMP RIAU, diseminasi standar instrumen pertanian dan modernisasi pertanian. Diseminasi standar instrumen pertanian yang telah dilaksanakan disajikan pada tabel 3.15.

Tabel 3. 14 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian BPMP RIAU melalui Website dan Media Sosial Bulan Januari – Desember 2025

No	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Media Diseminasi
1	VUB Untuk Lahan Toleran Salinitas	Website, FB, IG
2	SNI 7352-5:2023 tentang Bibit kambing – Bagian 5: Boerka Galaksi Agrinak	Website, FB, IG
3	SNI 8405-2:2023, SNI 8405-3:2023 tentang bibit ayam umur sehari/kuri (KUB ayam Janaka Agrinak dan KUB Narayana Agrinak	Website, FB, IG
4	Standar Mutu Beras SNI 6128: 2020	Website, FB, IG
5	Standar Mutu Susu Pateurisasi SNI 3951:2018 tentang	Website, FB, IG
6	Teknik Persemaian Dapog	Website, FB, IG
7	Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik SNI 8969:2021 tentang INDOGAP (Pada Penangkar Padi)	Website, FB, IG
8	Pupuk Organik Padat SNI 7763:2024	Website, FB, IG
9	SNI 8964:2021 tentang Kopi sangrai dan kopi bubuk	Website, FB, IG
10	Produksi Benih Jagung Komposit	Website, FB, IG
11	SNI 01-3946-1995 tentang Kopra	Website, FB, IG
12	SNI 8810:2019 tentang Pakan Konsentrat Kambing	Website, FB, IG
13	SNI 8370 : 2018 tentang Keripik Buah	Website, FB, IG
14	Varietas Unggul Padi Gogo Spesifik Lokasi Provinsi Riau	Website, FB, IG
15	Program Pemeliharaan Ternak Sapi	Website, FB, IG
16	Mengenal Hidroponik	Website, FB, IG
17	Urban Farming	Website, FB, IG
18	SNI 4482:Durian	Website, FB, IG
19	Hijauan Pakan Ternak Unggas	Website, FB, IG
20	SNI 9229:2023 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam	Website, FB, IG
21	SNI 3164 : 2024 tentang Mangga	Website, FB, IG
22	Jenis Kemasan Sayuran Segar	Website, FB, IG
23	Konsep Pengolahan Sampah	Website, FB, IG
24	Ketahanan Pangan dimulai dari Pekarangan	Website, FB, IG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, maka BPMP RIAU juga menyediakan layanan informasi publik melalui Portal PPID. Portal PPID telah diupload sebanyak 928 informasi publik seperti DIPA, LAKIN, laporan akhir tahun, SK PPID, laporan PPID, laporan bulanan PPID dan dokumen lainnya.

Pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2025, PPID BPMP RIAU meraih peringkat 5 UPT eselon III lingkup Kementan atau peringkat 1 lingkup

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian se-Indonesia. Capaian peringkat 5 besar KIP ini menjadi bukti komitmen BPMP RIAU dalam mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pertanian.



Gambar 3. 38 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Pemeringkatan KIP juga dilaksanakan untuk memberikan reward kepada UK/UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat. Tahun 2025, pemeringkatan KIP lingkup Kementerian Pertanian BPMP RIAU memperoleh peringkat 5 unit kerja eselon III lingkup Kementerian Pertanian. Kategori penilaian meliputi:

1. *Self Assesment Questioner* (SAQ): Sarana prasarana elektronik dan non elektronik dalam memberikan layanan informasi publik; Komitmen organisasi dalam mendukung layanan informasi publik; dan Keterbukaan informasi publik pada informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta
2. Website: Identitas instansi, Keamanan dan kemudahan penelusuran informasi, Tata kelola website, Inovasi, Keaktifan pengelola kontak layanan website
3. Wawancara: Validasi Penilaian Awal (SAQ dan Website), Komitmen Pimpinan dalam implementasi KIP di lingkungan kerjanya (Sarana dan Prasarana, Organisasi, Anggaran, SDM), Inovasi UK/UPT dalam pelayanan publik dan pengelolaan informasi publik

Untuk mengukur kualitas pelayanan, BPMP RIAU melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tabel 3. 15 Nilai IKM BPMP RIAU Tahun 2025

No	Periode	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Triwulan 1	86,75	B (Baik)
2	Triwulan 2	92,23	A (Sangat Baik)
3	Semester I	90,98	A (Sangat Baik)
4	Triwulan III	88,83	A (Sangat Baik)
5	Triwulan IV	88,62	A (Sangat Baik)
6	Tahun 2025	93,40	A (Sangat Baik)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur yaitu : a.) persyaratan pelayanan b.) prosedur pelayanan c.) waktu pelayanan d.) biaya/tarif e.) produk pelayanan f.) kompetensi pelaksana g.) perilaku pelaksana h.) penanganan pengaduan, saran dan masukan i.) sarana dan prasarana. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata tahun 2024 sebesar: 90,98 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,30 – 100,00 .

Dalam pelayanan informasi maupun layanan publik, BPMP RIAU membuka diri untuk menerima saran dan masukan untuk peningkatan pelayanan publik. Saran dan masukan dapat di sampaikan melalui layanan pengaduan masyarakat yang tersedia secara online. BPMP RIAU menyediakan sarana:

1. Layanan Pengaduan di Aplikasi SILAYAR
2. Layanan Pengaduan Masyarakat di Website
3. Layanan Saran dan Pengaduan KISS (Kami Ingin Saran Saudara)

Sarana pengaduan masyarakat disediakan secara online sehingga memudahkan masyarakat dalam menyampaikan saran, masukan dan pengaduan. Layanan pengaduan di Aplikasi SILAYAR berbasis website <https://riau.brmp.pertanian.go.id>

[/layanan/pengujian-dan-kesesuaian-standar/silayar-website](#). Layanan masyarakat di website dapat diakses melalui link: <https://riau.brmp.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/layanan-aspirasi-dan-pengaduan-online-rakyat-lapor>.

Layanan saran Saran dan Pengaduan KISS (Kami Ingin Saran Saudara) di sediakan di ruang PPID sehingga mudah diakses bagi publik/masyarakat/stakeholder yang datang langsung ke BPMP RIAU. KISS dibuat dalam bentuk barcode sehingga bisa dipindai dan diisi melalui smartphone.

3. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan

Selama tahun 2025, BPMP RIAU menerima mahasiswa/siswa magang sebanyak 49 orang seperti pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 16 Jumlah Mahasiswa/Siswa Magang di BPMP RIAU pada tahun 2025

No	Nama Sekolah / Universitas	Jumlah (orang)
1	Universitas Andalas	1
2	Universitas Islam Riau	19
3	Universitas Pasir Pangairan	6
4	Universitas Riau	6
5	Universitas Sains dan Teknologi Indonesia	2
6	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	3
7	SMK Bina Insan	4
8	SMK Pangkalan Kerinci	6
9	SMK Tuah Negeri, Kampar	2
TOTAL		49

4. Layanan Perpustakaan

Tugas penanggung jawab perpustakaan adalah mengelola perpustakaan yang meliputi pelayanan pengunjung, penambahan koleksi buku, pemeliharaan koleksi perpustakaan, pengembangan database dan mengunggah pustaka digital, menyiapkan bahan dan mendokumentasikan hasil-hasil pengkajian dalam bentuk perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Secara umum koleksi perpustakaan BPMP RIAU meliputi tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perikanan, bidang ilmu yang berkaitan dengan pertanian seperti ekonomi pertanian, kesehatan pangan, biologi dan lain sebagainya. Layanan perpustakaan juga dapat dilihat akses melalui : <https://riau.brmp.pertanian.go.id/>

layanan/pengujian-dan-kesesuaian-standar/perpustakaan

Pengunjung perpustakaan bulan januari – desember 2025 yang tercatat di buku tamu sebanyak 127 orang yang terdiri dari 127 orang mahasiswa/ siswa, dan 40 orang ASN. Database yang sudah terentry sampai tahun 2025 yaitu: 1). 547 Konten Digital, 2). Inlislite 483 Record, dan 3). Repository 570 Record.



Gambar 3. 39 Kunjungan Perpustakaan BPMP RIAU

5. Layanan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)

Sepanjang tahun 2025, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Riau telah melaksanakan kegiatan layanan perbenihan sebagai bagian dari upaya mendukung penyediaan benih bermutu bagi pemangku kepentingan sektor pertanian. Layanan UPBS difokuskan pada kegiatan diseminasi dan penjualan benih sumber berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan oleh petani, penangkar, serta instansi terkait.

Pada tahun 2025, UPBS BPMP RIAU mencatat 64 kali kegiatan diseminasi benih dengan total volume benih yang disalurkan mencapai 13.380 kg. Adapun rincian diseminasi tersebut meliputi benih jagung komposit sebanyak 3.220 kg, padi gogo sebesar 1.355 kg, serta padi sawah sebesar 7.820 kg. Kegiatan diseminasi ini menjadi sarana penting dalam memperluas adopsi varietas unggul dan meningkatkan akses masyarakat terhadap benih sumber yang berkualitas.

Selain kegiatan diseminasi, UPBS BPMP RIAU juga melaksanakan 67 kali transaksi penjualan benih selama tahun 2025. Total volume benih yang terjual mencapai 10.830 kg, yang terdiri atas jagung komposit sebanyak 2.095 kg dan padi sawah sebesar 8.735 kg. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan dan kepercayaan pengguna terhadap benih sumber yang diproduksi dan dikelola oleh UPBS BPMP RIAU.

Secara keseluruhan, pelaksanaan layanan UPBS BPMP RIAU selama tahun 2025 berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan perbenihan serta peningkatan produktivitas pertanian di Provinsi Riau. Di masa yang akan datang, diharapkan layanan UPBS dapat terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas layanan guna menjawab kebutuhan benih sumber secara berkelanjutan dan mendukung program pembangunan pertanian nasional. Rincian diseminasi dan penjualan UPBS BPMP Riau terlampir.

3.1.6. Kendala dan Langkah Antisipasi

Proses pencapaian sasaran program strategis BPMP RIAU pada TA 2025 terkendala karena adanya transformasi kelembagaan dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Secara siklus, awal tahun adalah masa krusial untuk memulai pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan program prioritas. Namun, transformasi kelembagaan menyebabkan blokir anggaran dan keterlambatan penerbitan DIPA.

Sistem keuangan negara (seperti aplikasi SAKTI) bekerja berdasarkan kode referensi yang kaku. Perubahan nama instansi menuntut pemetaan ulang (*mapping*) untuk reorganisasi kode akun, hingga detail bagan akun standar. Selain itu, proses memindahkan saldo atau pagu anggaran dari nomenklatur lama ke nomenklatur baru sering kali memakan waktu karena membutuhkan validasi tingkat tinggi agar tidak terjadi duplikasi atau kehilangan data anggaran.

Langkah antisipasi yang dilakukan antara lain mengubah target dan capaian sasaran sesuai waktu yang tersedia setelah selesainya transformasi kelembagaan dan bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk mempercepat capaian sasaran kegiatan strategi BPMP RIAU.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPMP RIAU didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA BPMP RIAU NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.567460/2025 dengan alokasi anggaran DIPA awal sebesar 6.517.446.000,- selama tahun 2025 BPMP Riau telah melakukan 17 kali revisi dan pada revisi terakhir jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 8.469.398.000,-. kronologis alokasi anggaran selama tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3. 17 Revisi Anggaran BPMP Riau TA 2025

Revisi Ke -	Tanggal Revisi	Anggaran	Justifikasi
1	07 Februari 2025	6.517.446.000	Revisi hal III DIPA
2	20 Februari 2025	6.517.446.000	Revisi blokir untuk efisiensi sesuai dengan Inpres no 1 tahun 2025
3	25 Maret 2025	8.167.446.000	Revisi buka blokir kegiatan 002 dan penambahan anggaran pendampingan kegiatan strategis Kementan
4	15 April 2025	8.167.446.000	Revisi hal III DIPA
5	30 April 2025	9.254.266.000	Revisi penambahan anggaran kegiatan perbenihan dan buka blokir anggaran pendampingan kegiatan strategis Kementan
6	09 Mei 2025	9.254.266.000	Revisi POK, pergeseran anggaran di KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, KRO Koordinasi dan KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal
7	10 Juni 2025	9.254.266.000	Revisi untuk penambahan gaji PPPK
8	04 Juli 2025	9.254.266.000	Revisi hal III DIPA
9	2 September 2025	8.394.564.000	Revisi pemindahan RO dan penghapusan blokir anggaran
10	19 September 2025	8.388.398.000	Revisi pembukaan blokir PNB

Revisi Ke -	Tanggal Revisi	Anggaran	Justifikasi
11	11 Oktober 2025	8.438.398.000	Revisi penambahan anggaran perjalanan dinas pada kegiatan pendampingan strategis
12	14 Oktober 2025	8.438.398.000	Revisi POK dan revisi halaman III DIPA
13	30 Oktober 2025	8.438.398.000	Revisi buka blokir akun ATK
14	19 November 2025	8.469.398.000	Revisi penambahan gaji PPPK tahap 2
15	24 November 2025	8.469.398.000	Revisi POK
16	3 Desember 2025	8.469.398.000	Revisi POK
17	10 Desember 2025	8.469.398.000	Revisi POK

3.2.1. Realisasi Keuangan

Jumlah anggaran yang terserap pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.378.704.272 atau 98,93% dari pagu Rp. 8.469.398.000,-. Pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2025 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Keuangan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Pegawai	4.009.284.000	3.987.100.608	99,45
2.	Barang	4.460.114.000	4.391.603.664	98,46
Total		8.469.398.000	8.378.704.272	98,93

Sumber : Data diolah dari SAKTI

3.2.2. Pengelolaan PNBP

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 44.987.000,- dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp. 108.520.950,- atau 241.23% Target dan realisasi PNBP BPMP RIAU pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3. 19 Target dan Realisasi PNBP BPMP RIAU Tahun 2025

No	Jenis PNBP	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	29.723.000	46.573.950	156.69
2.	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	15.264.000	15.282.000	100.12
3.	Pendapatan Lain-Lain	0	46.665.000	0
Jumlah		44.987.000	108.520.950	241.23

Sumber : Data diolah dari SAKTI

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP TA 2025 (per 31 Desember 2025) sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN sebesar Rp.46.573.950,00 merupakan penerimaan yang berasal dari perolehan hasil pertanian berupa perbenihan padi (UPBS) kelas SS yaitu Biosalin 2 Agritan, Inpari 32 HDB, Inpari 34 salin Agritan, Inpari 49 Jembar, dan Cakrabuana Agritan Rp.45.150.000,00 dan juga berupa sewa tanah, gedung, dan bangunan untuk kantin Rp.1.423.950,00.
2. Pendapatan administrasi dan penegakan hukum sebesar Rp15.282.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi pada pengujian di Laboratorium BPMP RIAU.
3. Pendapatan lainnya sebesar Rp46.665.000,00 yang berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebanyak 8 pegawai. Seluruh piutang kelebihan pembayaran tunjangan fungsional telah diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat sisa piutang pada akhir periode pelaporan.

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja BPMP RIAU tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis antara lain :

- Sasaran 1: terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani dengan capaian realisasi 100 %
- Sasaran 2: tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif dengan capaian realisasi 106.78 %
- Sasaran 3: terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan capaian realisasi 100.62 %
- Sasaran 4: terkelolanya anggaran badan perakitan dan modernisasi pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan capaian realisasi 107.41 %

Rata- rata capaian indikator kinerja BPMP RIAU tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025 sebesar 103.70 % atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**.

Pada tahun anggaran 2025, realisasi anggaran BPMP RIAU adalah sebesar Rp. 8.378.704.272 atau 98,93% dari pagu Rp. 8.469.398.000,- dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,74. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 44.987.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 108.520.950,- atau 241.23%

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Koordinasi dan perencanaan kegiatan yang baik sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya meningkatkan nilai indikator capaian kinerja BPMP RIAU.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja maka langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan mengikuti pedoman dan rencana kegiatan yang tercantum dalam Renstra 2025 – 2029 sesuai tugas dan fungsi Badan Perakitan

dan Modernisasi Pertanian.

2. Melakukan koordinasi secara berkala dan antisipasi terhadap risiko masing-masing kegiatan yang dapat menghambat tercapainya tujuan dan target kegiatan yang telah ditetapkan.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Riau (pertama)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau
Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206
WEBSITE : www.riau.bmp.pertanian.go.id, E-MAIL : bmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Wahyana Anggara

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 18 Mei 2025
Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Agus Wahyana Anggara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	70
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	35.951.000
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	35.951.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	1.086.820.000
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	1.086.820.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	8.131.495.000
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	8.131.495.000

Total anggaran terblokir senilai Rp.911.735.000,- terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 35.951.000,-
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 6.315.000,-
- Program Dukungan Manajemen Rp. 869.469.000,-

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Agus Wahyana Anggara

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	70	Ton
		TOTAL		Ton



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoan, Pekanbaru - Riau
Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206
WEBSITE : www.riau.bmp.pertanian.go.id, E-MAIL : bmp.riau@pertanian.go.id, bmp.riau@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Wahyana Anggara

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Pekanbaru, 18 Mei 2025
Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Agus Wahyana Anggara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	70
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 35.951.000
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp 35.951.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 1.086.820.000
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 1.086.820.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.131.495.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 8.131.495.000

Total anggaran terblokir senilai Rp.911.735.000,- terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 35.951.000,-
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 6.315.000,-
- Program Dukungan Manajemen Rp. 869.469.000,-

Pihak Kedua


Fadry Djufri

Pihak Pertama


Agus Wahyana Anggara

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	70	Ton
		TOTAL		Ton

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Riau (Revisi II)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau

Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.riau@pertanian.go.id, bsipriau@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shannora Yuliasari

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua


Fadjry Djufry


Shannora Yuliasari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	35.951.000
		Rp	35.951.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	-
		Rp	-
3	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	6.481.495.000
		Rp	6.481.495.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen
Pertanian


Fadry Djufry

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Riau


Shannora Yuliasari

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
		TOTAL		UNIT



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau

Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.riau@pertanian.go.id, bsipriau@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shannora Yuliasari

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua


Fadjry Djufry


Shannora Yuliasari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	35.951.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	35.951.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	-
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	6.481.495.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	6.481.495.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadry Djufry

Pekanbaru, 30 Desember 2024
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau


Shannora Yuliasari

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
		TOTAL		UNIT

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPMP RIAU (Revisi III)

WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Wahyana Anggara

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama



Fadry Djufry



Agus Wahyana Anggara

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	70	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	Orang
		LAINNYA		
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85	Nilai (0-100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	91.00	Nilai (0-100)

Kode Program/ Kegiatan

EC Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

HA Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian

WA Dukungan Manajemen

6918 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi

Anggaran (Rp)

Rp 29,785,000

Rp 29,785,000

Rp 1,086,820,000

Rp 1,086,820,000

Rp 7,352,793,000

Rp 7,352,793,000

Rp 8,469,398,000

Total anggaran terblokir senilai Rp.45.799.000,- terdiri dari:

- Program Dukungan Manajemen Rp. 45.799.000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Fadry Djufry



Agus Wahyana Anggara

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	69,225	Ton
		Produksi Calon Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Calon Benih Padi kelas SS	5,520	Ton
		TOTAL	74,745	Ton

Lampiran 4. SK Kepala BRMP Penetapan Nilai ZI 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
 - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
 MODERNISASI PERTANIAN
 NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
 TENTANG
 HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
 PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

KADJURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 5. Manual IKU BPMP Riau

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI RIAU**

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI RIAU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
		3. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5. Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai

1. Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga)

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Formula Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
Satuan	Lembaga
Target	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BRMP Riau
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta

	☐ Non Cascading								
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Riau								
Sumber Data	BRMP Riau								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar</td><td>Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.</td></tr> <tr> <td>Penerapan standar tidak konsisten</td><td>Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.	Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang		
Potensi Risiko	Mitigasi								
rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.								
Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang								
Catatan									

2. Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
Satuan	Teknologi
Target	2025: 0 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BRMP Riau
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)										
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize										
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Riau										
Sumber Data	BRMP Riau										
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir										
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan										
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td><td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td></tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td><td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td></tr> <tr> <td>Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan</td><td>Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.		
Potensi Risiko	Mitigasi										
Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.										
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.										
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.										
Catatan											

3. Manual Indikator 2: Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan (unit)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
	Formula Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan
	Tujuan untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan terjamin ketersediaannya,
Satuan	Unit
Target	2025: 70 2026: 12.036 2027: 5.026 2028: 5.026 2029: 5.026
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BRMP Riau
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Riau								
Sumber Data	BRMP Riau								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td><td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td></tr> <tr> <td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td><td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td></tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td><td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.
Potensi Risiko	Mitigasi								
Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya								
Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.								
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.								
Catatan	Produksi Benih Sumber mencakup benih sumber yang telah tersertifikasi serta calon benih sumber yang masih dalam proses produksi dan belum memperoleh sertifikasi, yang perhitungannya dimaksudkan untuk mencerminkan kapasitas produksi benih sumber pada periode berjalan.								

4. Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (orang)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
	Tujuan Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
Satuan	Orang
Target	2025: 0 2026: 300 2027: 600 2028: 900 2029: 1200
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BRMP Riau
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)									
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize									
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Riau									
Sumber Data	BRMP Riau									
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir									
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan									
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poten i Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td> <td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td> </tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td> <td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td> </tr> <tr> <td>Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan</td> <td>Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td> </tr> </tbody> </table>		Poten i Risiko	Mitigasi	Teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.
Poten i Risiko	Mitigasi									
Teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.									
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.									
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.									
Catatan	▪ teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modern yang diterapkan bisa salah satu atau kombinasi antara teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modernisasi ▪ Teknologi digital dapat berupa aplikasi SIAP TANAM, aplikasi digital pertanian lainnya, dll ▪ <i>Smart farming</i> dapat berupa penggunaan varietas unggul bersertifikat, pupuk dan pestisida tepat dosis, waktu dan cara, penggunaan air yang efektif, serta pertanian presisi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan (penggunaan sensor dan IoT, sistem monitoring digital, sistem otomasi) ▪ <i>Modern farming</i> adalah pemanfaatan mekanisasi dalam proses pertanian seperti penggunaan traktor, drone, alat tanam dan lainnya yang efektif dan efisien.									

5. Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
	Formula Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BRMP
	Tujuan Mewujudkan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 85 2026: 85.53 2027: 85 2028: 85 2029: 85
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BRMP Riau
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya											
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High											
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact											
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Riau											
Sumber Data	BRMP Riau											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja</td> <td>Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.</td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.</td> <td><i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td>SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas</td> <td>Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata
Potensi Risiko	Mitigasi											
Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.											
Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.											
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.											
SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata											
Catatan												

Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA.
	Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
	Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..
Satuan	Nilai
Target	2025: 91 2026: 91 2027: 91 2028: 91 2029: 91
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BRMP Riau
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya											
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High											
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact											
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Riau											
Sumber Data	BRMP Riau											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat</td> <td>Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realisti dan terukur.</td> </tr> <tr> <td>Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.</td> <td>Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.</td> </tr> <tr> <td>Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan</td> <td>Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan</td> </tr> <tr> <td>Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal</td> <td>Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realisti dan terukur.	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Potensi Risiko	Mitigasi											
Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realisti dan terukur.											
Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.											
Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan											
Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan											
Catatan												

Lampiran 6. SK Kepala BPMP Riau tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lakin) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau
Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206
WEBSITE : www.riau.bmp.pertanian.go.id, E-MAIL : bmp.riau@pertanian.go.id, bmp.riau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NOMOR: 1104/KPTS/RC.320/H.12.6/05/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan dan penerbitan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau diperlukan tim penyusun yang efektif dan efisien;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025.

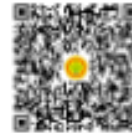
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) 2025 bertugas menyusun laporan kinerja Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun 2025 dalam Bahasa Indonesia dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BRMP Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Mei 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BRMP Riau



AGUS WAHYANA ANGGARA

Tembusan:

1. Kepala Subbag Tata Usaha;
2. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian
4. Ketua Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian;
5. Ketua Kelompok Fungsional Tertentu;
6. Peringgal.

Lampiran : 1. KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA (LAKIN) BRMP
RIAU TA 2025

Nomor : 1104/KPTS/RC.320/H.12.6/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si.	Penanggung Jawab
2.	Dr. Achmad Saiful Alim, S.TP., M.Sc.	Ketua
3.	Kurnia Tanjungari, SP., M.Sc.	Sekretaris
4.	Bagus Duhan Irfandy, S.T.	Anggota
5.	Lethifa Rastriana, S.E.	Anggota
6.	Suci Hartina Fani Putri, S.T.	Anggota
7.	Mutia Nurhaliza, S.E.	Anggota
8.	Syadza Yasmine, S.Si.	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Mei 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepal BRMP Riau



AGUS WAHYANA ANGGARA

Lampiran 7. Rincian dan Diseminasi Penjualan UPBS BPMP Riau Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
1	Padi Gogo	40	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan Kabupaten Indragiri Hilir	14 Januari 2025	Diseminasi
2	Padi Gogo	200	Koperasi Makmur Mandiri Karya Kabupaten Rokan Hilir	16 Januari 2025	Diseminasi
3	Padi Gogo	15	BBI Marpoyan Kota Pekanbaru	17 Januari 2025	Diseminasi
4	Jagung Komposit	700	Kelompok Tani Maju Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Siti Khusniyati)	28 Januari 2025	Penjualan
5	Padi Gogo	200	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	31 Januari 2025	Diseminasi
6	Jagung Komposit	300	Kelompok Tani Arihta Jaya Kabupaten Siak	31 Januari 2025	Diseminasi
7	Padi Sawah	15	BP Bayas Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir	10 Februari 2025	Diseminasi
8	Jagung Komposit	30	Bambang Siswanto (Petani Kabupaten Rokan Hulu)	10 Februari 2025	Penjualan
9	Padi Sawah	200	BP Bina Tani Kabupaten Indragiri Hilir	12 Februari 2025	Diseminasi
10	Jagung Komposit	165	BPP Kecamatan Batang Tuaka	12 Februari 2025	Diseminasi
12	Jagung Komposit	30	BBI Marpoyan Kota Pekanbaru	19 Februari 2025	Penjualan
11	Padi Sawah	950	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan	19 Februari 2025	Diseminasi
13	Jagung Komposit	5	RAPP	20 Februari 2025	Penjualan
14	Jagung Komposit	120	RAPP	25 Februari 2025	Penjualan

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
15	Padi Sawah	200	Kelompok Tani Sumber Rezeki Kabupaten Siak	26 Februari 2025	Diseminasi
16	Jagung Komposit	45	BBI Marpoyan Kota Pekanbaru	27 Februari 2025	Penjualan
17	Jagung Komposit	10	Babinkantibmas Desa Pulau Baru Kec. Kuantan Hilir Seberang	27 Februari 2025	Penjualan
18	Jagung Komposit	240	Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi Kep. Meranti mewakili; 3 KT (KT Jagung Besari, KT Jagung Sungai Tohor, KT Berjuang Bareng)	27 Februari 2025	Diseminasi
	Jagung Komposit	40	KT Jagung Besari	27 Februari 2025	Diseminasi
	Jagung Komposit	100	KT Jagung Sungai Tohor	27 Februari 2025	Diseminasi
	Jagung Komposit	100	KT Berjuang Bareng	27 Februari 2025	Diseminasi
19	Jagung Komposit	100	BBI Marpoyan Kota Pekanbaru	3 maret 2025	Penjualan
20	Jagung Komposit	100	BBI Marpoyan Kota Pekanbaru	3 maret 2025	Penjualan
21	Padi Sawah	40	KT Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	4 Maret 2025	Diseminasi
22	Padi Gogo	80	KUD Karya Sembada Kabupaten Kampar	10 Maret 2025	Diseminasi
23	Padi Sawah	500	KT Maju Tak Gentar Kabupaten Rokan Hulu	19 Maret 2025	Diseminasi
24	Padi Sawah	100	Erwan, PPL Desa Pasir Baru Kec. Rambah Kab. Rohul	22 Maret 2025	Penjualan
25	Padi Sawah	150	Erwan, PPL Desa Pasir Baru Kec. Rambah Kab. Rohul	22 Maret 2025	Diseminasi
26	Jagung Komposit	30	Erwan, PPL Desa Pasir Baru Kec. Rambah Kab. Rohul	22 Maret 2025	Diseminasi
27	Padi Sawah	175	KT Ngudi Subur, Desa Rambah,	11 April 2025	Diseminasi

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
			Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu		
28	Jagung Komposit	90	KT Ngudi Subur, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu	11 April 2025	Diseminasi
29	Padi Sawah	30	Eko Pirmanto, Korluh BPP Kempas Jaya, Desa Kempas Jaya, Kec. Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir	11 April 2025	Diseminasi
30	Jagung Komposit	510	Eko Pirmanto, Korluh BPP Kempas Jaya, Desa Kempas Jaya, Kec. Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir	11 April 2025	Diseminasi
31	Padi Sawah	45	Giono, PPL Desa Pasir Maju Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu	11 April 2025	Penjualan
32	Padi Sawah	575	Bukhari, Sekretaris Poktan Usaha Bersama Desa Muara Kelantan Kec. Sungai Mandau Kab. Siak	11 April 2025	Diseminasi
	Padi Sawah	100	Bukhari, Sekretaris Poktan Usaha Bersama Desa Muara Kelantan Kec. Sungai Mandau Kab. Siak	11 April 2025	Diseminasi
33	Padi Sawah	300	KT Sakato Desa Pulau Kalimantan Kec. Benai Kabupaten Kuantan Singingi	13 April 2025	Diseminasi
34	Padi Gogo	40	M. Taufik, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan	14 April 2025	Diseminasi
	Jagung Komposit	40	M. Taufik, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan	14 April 2025	Diseminasi

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
			dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan		
35	Padi Sawah	1155	Agus Nugroho, CV. Utama Karya Tani	15 April 2025	Penjualan
36	Padi Sawah	795	Tarmizi, PPL Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	15 April 2025	Diseminasi
37	Padi Gogo	160	Tarmizi, PPL Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	15 April 2025	Diseminasi
	Jagung Komposit	120	Tarmizi, PPL Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	15 April 2025	Diseminasi
38	Padi Sawah	750	Rama Erwandi, Caraka Kodim 0302 Inhu	18 April 2025	Diseminasi
39	Padi Sawah	1200	Azra Saputra, CV. Karya Putra Abadi	20 April 2025	Penjualan
40	Padi Sawah	1750	Ismail, Poktan Mawar Indah Desa Seberang Sanglar Kec Reteih Kab. Indragiri Hilir	21 April 2025	Diseminasi
41	Padi Sawah	335	Poktan Mekar Serumpun, Desa Teluk Sungkai Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu (Rama)	25 April 2025	Diseminasi
42	Jagung Komposit	40	Inke, CV. Al Fazza Karomah Garden, Kabupaten Kampar	30 April 2025	Penjualan
43	Padi Gogo	25	Korluh Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar	30 April 2025	Diseminasi
	Jagung Komposit	90	Korluh Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar	30 April 2025	Diseminasi
44	Jagung Komposit	60	PPL Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar	30 April 2025	Diseminasi
45	Jagung Komposit	10	Inke, CV. Al Fazza Karomah Garden, Kabupaten Kampar	16 Mei 2025	Penjualan
46	Padi Sawah	30	BP Bayas Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir	17 Mei 2025	Diseminasi

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
47	Jagung Komposit	15	Emwizal, Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota Sumatera Barat	17 Mei 2025	Penjualan
48	Jagung Komposit	15	Kelompok Tani Tuah Sepakat II Kuansing	18 Mei 2025	Diseminasi
49	Jagung Komposit	40	Delviagris, PPL Desa Rokan Kec, Rokan IV Koto Kab Rokan Hulu	19 Mei 2025	Penjualan
50	Jagung Komposit	30	Jufrizal, KT Garuda Jaya Pekanbaru	19 Mei 2025	Penjualan
51	Jagung Komposit	35	Bambang Siswanto (Petani Kabupaten Rokan Hulu)	19 Mei 2025	Penjualan
52	Jagung Komposit	60	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Bengkalis (Heru Siswanto, POPT Mandau dan Pinggir)	23 Mei 2025	Diseminasi
53	Jagung Komposit	10	Herman, Bumdes Pulau Kulur Desa Pulau Kulur Kec. Kuantan Hilir Seberang	26 Mei 2025	Penjualan
54	Jagung Komposit	20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Bengkalis (Heru Siswanto, POPT Mandau dan Pinggir)	28 Mei 2025	Diseminasi
55	Padi Gogo	320	Bambang Siswanto, KT Pemuda Sahabat Alam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu	2 Juni 2025	Diseminasi
	Jagung Komposit	180	Bambang Siswanto, KT Pemuda Sahabat Alam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu	2 Juni 2025	Diseminasi
56	Jagung Komposit	50	Dwi Afrian, PPL BPP Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar	3 Juni 2025	Penjualan
57	Jagung Komposit	20	Muharimis Syafi'I, PPL Desa Pulau Panjang Hulu dan Hilir Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi	11 Juni 2025	Penualan

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
58	Padi Gogo	10	Mustafa Kamal, BBI Marpoyan Kota Pekanbaru	11 Juni 2025	Diseminasi
	Padi Gogo	10	Mustafa Kamal, BBI Marpoyan Kota Pekanbaru	11 Juni 2025	Diseminasi
59	Padi Gogo	10	Fauziyati, KT Pematang Panjang Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar	12 Juni 2025	Diseminasi
60	Padi Gogo	240	Rama Erwandi, Caraka Kodim 0302 Inhu (KT Nibung Kiri Desa Anak Talang Kec. Seberida Kab. Inhu)	12 Juni 2025	Diseminasi
61	Jagung Komposit	80	Panut, BBI Marpoyan Kota Pekanbaru	18 Juni 2025	Diseminasi
62	Jagung Komposit	20	Restidiana, Bumdes Tanjung Medan Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi	18 Juni 2025	Penjualan
63	Jagung Komposit	300	Sigit Prio Agung Laksono, Bumdes Al Hidayah Desa Sencalang Kec Keritang Kab Indragiri Hilir	28 Juni 2025	Penjualan
64	Jagung Komposit	50	Hasanudin, Bumdes Mekar Sari Abadi Desa Kembang Mekar Sari Kec Keritang Kab Indragiri Hilir	28 Juni 2025	Penjualan
65	Jagung Komposit	60	Ahmad Irfan, Bumdes Rasau Kuning Desa Pengalihan Kec Keritang Kab Indragiri Hilir	28 Juni 2025	Penjualan
66	Jagung Komposit	100	Herman, Bumdes Pulau Kulur Desa Pulau Kulur Kec. Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	2 Juli 2025	Penjualan

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
67	Jagung Komposit	45	Bambang Siswanto (Petani Kabupaten Rokan Hulu)	9 Juli 2025	Penjualan
68	Jagung Komposit	15	Afriyendie, Ketua KT Sahabat Dapur Umat Kota Pekanbaru	8 Juli 2025	Penjualan
69	Jagung Komposit	60	Jaka Rianto, KT Binusa Puncak Makmur Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis	16 Juli 2025	Diseminasi
70	Jagung Komposit	30	Era Kurniati, Staf Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan	18 Juli 2025	Diseminasi
71	Jagung Komposit	10	Zefri Marantomy, Bumdes Maju Jaya, Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar	24 Juli 2025	Penjualan
72	Jagung Komposit	60	Thalib, Bumdes Kuala Keritang Desa Kuala Keritang Kec. Kuala Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	24 Juli 2025	Penjualan
73	Jagung Komposit	375	Damianus Ceh, KTH Akit Maju, Desa Dungun Baru Kec. Rupat Kab. Bengkalis	24 Juli 2025	Diseminasi
74	Jagung Komposit	195	Mislan, KT Al Mubaroq Kelurahan Madani Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir	25 Juli 2025	Diseminasi
75	Jagung Komposit	45	Hardiamon, KT Tuah Saiyo Desa Pulau Kijang Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi	29 Juli 2025	Diseminasi
76	Jagung Komposit	45	Teguh Purwoko, Bumdes Kompe Cemerlang, Desa Kompe Berangin, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi	31 Juli 2025	Penjualan

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
77	Jagung Komposit	75	Letda Infanteri Ade Rizki Mufaraz, SP, Batalyon TP 851/BBC Siak. Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak	5 Agustus 2025	Diseminasi
78	Padi Sawah	625	Esti Septianti, SP, BPP Sabak Auh, Desa Sungai Tengah Kec. Sabak Auh, Kabupaten Siak	24 Agustus 2025	Diseminasi
79	Jagung Komposit	135	Syafrizal, Kabid TPH Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai	7 Agustus 2025	Diseminasi
80	Jagung Komposit	5	Soiman, PMHP DKPP Kota Dumai	7 Agustus 2025	Diseminasi
81	Padi Sawah	300	BP Bayas Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir	15 Agustus 2025	Diseminasi
82	Padi Sawah	10	Anis Fahri, Mahasiswa USU, Kota Pekanbaru	12 Agustus 2025	Penjualan
83	Padi Sawah	15	Muhammad Padillah, Anggota KT Pajar Desa Kelayang Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu	26 Agustus 2025	Penjualan
84	Jagung Komposit	60	Zaipil Rozak, PPL BPP Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu	28 Agustus 2025	Diseminasi
85	Padi Sawah	60	Wawan Kurniawan, PPL Bandar Laksamana Kec. Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	29 Agustus 2025	Penjualan
86	Padi Sawah	20	Purwono, Anggota KT Subur Makmur Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar	1 September 2025	Penjualan
87	Padi Gogo	5	Purwono, Anggota KT Subur Makmur Desa Sialang Kubang	1 September 2025	Diseminasi

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
88	Padi Sawah	100	Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar Bunyamin, Petani Desa Pematang Lalang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	4 September 2025	Penjualan
89	Padi Sawah	20	Hasrullah, Penyuluh Pertanian Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir	4 September 2025	Penjualan
90	Padi Sawah	50	Tut Triawan, Bumdes Asta Lestari Desa Anak Setatah Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti	9 September 2025	Penjualan
91	Padi Sawah	110	Selamat, KT Merbau Jaya Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	15 September 2025	Penjualan
92	Padi Sawah	250	Bambang Siswanto, KT Pemuda Sahabat Alam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu	12 September 2025	Penjualan
93	Padi Sawah	40	Selamat, KT Merbau Jaya Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	15 September 2025	Penjualan
94	Padi Sawah	75	Bambang Siswanto, KT Ngudi Subur Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu	12 September 2025	Penjualan
95	Padi Sawah	50	Hamzah, BP Bina Tani, Desa Kuala Sebatu, Kec. Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir	13 September 2025	Penjualan
96	Padi Sawah	10	Darmayudi, Karyawan Swasta Kel. Sukamulya Kec. Sail Kota Pekanbaru	13 September 2025	Penjualan
97	Padi Sawah	120	Bambang Siswanto, KT Pemuda Sahabat	16 September 2025	Penjualan

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
98	Padi Sawah	25	Alam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Tomiri, PPL KT Mekar Maju Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir	16 September 2025	Penjualan
99	Padi Sawah	1960	Yuliani Pramita, Admin PT Gembur Mekar Jaya Kelurahan Tuahkarya Kec. Tuahmadani Kota Pekanbaru	19 September 2025	Penjualan
100	Padi Sawah	50	Tomiri, PPL KT Mekar Maju Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir	19 September 2025	Penjualan
101	Padi Sawah	5	Bambang, Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	25 September 2025	Penjualan
102	Padi Sawah	125	Yanto Sukanto, Gapoktan Mulia Tani, Desa Jayapura Kec. Bungaraya Kab. Siak	30 September 2025	Penjualan
103	Padi Sawah	100	Panut, KT Usaha Maju Bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir	3 Oktober 2025	Penjualan
104	Padi Sawah	20	Rudolf Lumbangaol, KT Unggul Tani Desa Pekaitan Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir	3 Oktober 2025	Penjualan
105	Padi Sawah	2500	Polbangtan Malang (Novi Nuraini)	4 November 2025	Penjualan
106	Padi Sawah	25	Hendra, KT Berkat Ilahi Desa Sungai Tengah Kec Sabak Auh Kab Siak	6 November 2025	Penjualan
107	Padi Sawah	280	Dwi Sisriyenni, Ketua Panitia Rakor Perbenihan BPMP RIAU	6 November 2025	Penuan

No	Jenis	Jumlah (Kg)	Instansi	Tanggal Penyerahan	Keterangan
108	Padi sawah	70	Bambang, Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	7 November 2025	Penjualan
109	Padi Sawah	15	Bambang, Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	13 November 2025	Penjualan
110	Padi Sawah	5	Benny Utomo, KT Suak Tiung Sepakat Desa Teluk Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan	13 November 2025	Penjualan
111	Padi Sawah	20	Roni Gunawan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Rokan Hulu	26 November 2025	Penjualan
112	Padi Sawah	5	BRMP Kepri, Firsta Anugrah Sariri, Kel Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	15 Desember 2025	Penjualan
113	Padi Sawah	100	Bambang, Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	19 Desember 2025	Penjualan

Lampiran 8. Pernyataan Mandiri SNI Bina UMK Pelaku Usaha Nata de Coco "Salju"



PERNYATAAN MANDIRI Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : BADRUN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1607220007237
Standar Nasional Indonesia : -SNI 4137:2018 - Nata dalam kemasan

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tembilahan, 16 November 2025
ttd.
(BADRUN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Lampiran 9. Surat Keputusan Sertifikasi Produk SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk, Nomor 56/7701/SRTF/I/2025 untuk Rumah Produksi My Limer Coffee.



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES
LSPro PT RPN CCQC
Jl. Salak No. 1A, Bogor; Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118 Indonesia
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
website: www.lspro.rpn.co.id; e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.7.01; 3/1





CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES

LSPro PT RPN CCQC

Jl. Salak No. 1A Bogor, Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68116
Telp (0331) 487270, 488864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.rpn.co.id, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.7.01;3/1

Lampiran

Nama Perusahaan : Jalaluddin
Alamat : PARIT JANG, Desa/Kelurahan Kedabu Rapat,
Perusahaan/Pabrik : Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Kepulauan Meranti,
(lengkap) Provinsi Riau
Nomor Sertifikat Produk : 56/7701/SRTF/1/2025
Masa Berlaku : 17 Januari 2025 – 16 Januari 2029
Sistem Sertifikasi : PBSN Nomor 1 Tahun 2020 Lampiran XXXV
Sistem Manajemen : -
Merek : My Limer Coffee
No. Tanda Pengenal : -
Produsen : -
Spesifikasi Produk : -
No SNI : SNI 8964:2021
Judul SNI : Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
Tipe/jenis Barang : Kopi Bubuk Liberika Kemasan 100 g, 250 g dan
500 g
Kuantitas Barang* : -
Nomor Packing List/ : -
Nomor Invoice** : -

Keterangan :

* untuk barang dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen

** untuk barang impor dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen

Bogor, 17 Januari 2025 :

Disahkan oleh :

Kepala LSPro PT RPN CCQC

Dr. Adi Cifriadi



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES

LSPro PT RPN CCQC

Jl. Salak No. 1A Bogor; Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.rpn.co.id, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.6.03;3/1

Bogor, 17 Januari 2025

No. : 04/6703/II/2025
Lamp. : -
Hal. : Keputusan Sertifikasi

Kepada Yth./to
Jalaluddin
Jl. Parit Jang RT/RW 02/01 Dusun Parit
Jang Desa Kedabu Rapat Kec Rangsang
Pesisir Kab. Kep. Meranti

Berdasarkan hasil audit lapang, pengujian contoh dan evaluasi Komisi Teknis, dengan ini diinformasikan bahwa permohonan sertifikasi/survailen..../resertifikasi* atas :

Based on audit results, sampling dan technical commission evaluation, we hereby inform that the application for certification of the following companies:

Nama dan alamat perusahaan : Jalaluddin
Jl. Parit Jang RT/RW 02/01 Dusun Parit Jang Desa Kedabu Rapat Kec Rangsang Pesisir Kab. Kep. Meranti
Name and address of company
No. ID : 18/CCQC/KBU/XII/2024
Produk/merek : My Limer Coffee
Product/brand
Type Produk : Kopi sangrai dan bubuk kopi
Type of product
Daftar ukuran produk/ : Kemasan 100 gr, 250 gr dan 500 gr
Product size list
Persyaratan Produk/ : SNI 8964:2021
Requirement
Peraturan/Regulation : Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
Sistem sertifikasi/ : Tipe 3
Certification scheme
Lokasi pabrik/ Factory : Jl. Parit Jang RT/RW 02/01 Dusun Parit Jang Desa Kedabu Rapat Kec Rangsang Pesisir Kab. Kep. Meranti
location
Tanggal Audit : 23-24 Desember 2024
Lapang/Date of audit

maka Kepala LSPro PT RPN CCQC mengesahkan keputusan komtek untuk diterapkan pemberian/dilanjutkan/penghentian/pengurangan/pembekuan/pencabutan*) Sertifikat Kesesuaian untuk perusahaan JALALUDDIN.

Then The Head of LSPro PT RPN CCQC authorized the technical committee's decision to approve certification for Name of Company.



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES

LSPro PT RPN CCQC

Jl. Salak No. 1A Bogor; Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.rpn.co.id, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.6.03;3/1

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih/ Thank you for your attention.

LSPro PT RPN CCQC

Dr. Adi Cifriadi
Kepala

Lampiran 10. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI

 **BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL**

**SURAT PERSETUJUAN
PENGUNAAN TANDA SNI**

Nomor : 1 00089 1 012025 

Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada :

Nama Perusahaan	: Jalaluddin
Alamat Perusahaan	: PARIT JANG, Desa/Kelurahan Kedabu Rapat, Kec. Rangsang Pesisir Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau
Nama Pabrik / Layanan Jasa	: Jalaluddin
Alamat Pabrik / Layanan Jasa	: PARIT JANG, Desa/Kelurahan Kedabu Rapat, Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
Nama Produk / Layanan Jasa	: Kopi sangrai dan kopi bubuk
Jenis Produk / Layanan Jasa	: Kopi, Teh, Kakao
Merk	: My Limer Coffee
Lembaga Sertifikasi	: PT. Riset Perkebunan Nusantara – Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (CCQC)

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan : SNI 8964 : 2021

Masa berlaku sampai dengan 16 Januari 2029

Diterbitkan di : JAKARTA
Kepala BSN,



(Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc.)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR 

 **BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL**

Lampiran 11. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Balai

 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) RIAU	KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: B-1002/OT.210/H.12.6/05/2025
		Tanggal Pembuatan	: 17 Mei 2025
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 17 Mei 2025
		Disahkan oleh	KEPALA BRMP RIAU,  Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si.,M.Si. NIP. 19740402 199903 1 001
		Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BALAI

Dasar Hukum • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119); • Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025.	Kualifikasi pelaksana • Memiliki kemampuan menguasai komputer • Memiliki kemampuan mengolah data • Memahami prinsip dasar perencanaan kegiatan • Memiliki kemampuan bekerja dalam Tim
Keterkaitan • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Riau	Peralatan/Perlengkapan • Seperangkat komputer dan alat tulis • KAK/TOR, DIPA dan RKAKL
Peringatan • Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian kinerja BRMP Riau	Pencatatan dan Pendataan • Laporan berkala • LAKIN

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	B-1002/OT.210/H.12.6/05/2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	17 Mei 2025
TIM KERJA PROGRAM DAN EVALUASI	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BALAI
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) RIAU

Pengertian	:	Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Balai
Tujuan	:	Tersedianya laporan pencapaian indikator kinerja utama BRMP Riau
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119); • Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025
Prosedur	:	• Pengumpulan data dari setiap unit dan penanggung jawab kegiatan • Pembuatan laporan oleh tim pelaporan • Mengoreksi kesesuaian format dan isi laporan • Menerima perbaikan laporan • Memperbaiki laporan Balai • Penandatanganan laporan • Melakukan proses lebih lanjut ke BBP2MP • Mendokumentasikan
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Riau

NO: 1002/2025 - SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BALAI

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

No	KEGIATAN	Pelaksanaan				MUTU BAKU			KET
		Penanggung Jawab Kegiatan	Tim Pelaporan	Ketua Tim kerja PE	Ka. BRMP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengumpulan data setiap dan penanggungjawab kegiatan					Berkas laporan	5 hari	Berkas laporan	
2	- Membuat/menyusun laporan kinerja Balai - Meneruskan ke tim kerja PE, setelah diperbaiki apabila diperlukan					Berkas laporan	5 hari	Berkas laporan	
3	Mengoreksi kesesuaian format dan isi laporan					Berkas laporan	2 hari	Berkas laporan	
4	Melakukan proses koreksi, finalisasi laporan dan penandatanganan laporan					Berkas laporan	2 hari	Berkas laporan	
5	Pencetakan laporan dan pengiriman ke BBP2MP					Berkas laporan dan surat pengantar	2 hari	Berkas laporan dan surat pengantar	
6	Mendokumentasikan					Berkas laporan dan surat pengantar	1 hari	Berkas laporan dan surat pengantar	